



fiskal

waspada antisipatif responsif



No ISSN: 2337-6309

KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL UNTUK MEMPERKUAT INVESTASI DAN PERDAGANGAN



Indonesia di antara Kekuatan
Jepang, Tiongkok dan Korea
Selatan dalam Penguatan
Stabilitas Keuangan di
Kawasan ASEAN+

Inisiatif Baru Pembiayaan
Keuangan Berkelanjutan
di Kawasan Asia Pasifik

Penguatan Posisi
Indonesia di ASEAN
Melalui Pendalaman
Sektor Keuangan



9 772337 630007

Edisi III/2024



Warta Fiskal dapat diunduh
melalui website

fiskal.kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty,
Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan,

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita
Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Afif Hanifah,
Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary,
Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto,
Catherine Natantya Widyanti, Mohamad Nasir, Angga
Eko Prasetyo Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:

Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.



Kebijakan Regional dan Bilateral untuk Memperkuat Investasi dan Perdagangan: Memanfaatkan Indo-Pacific Economic Framework For Prosperity (IPEF)

Syahrir Ika¹

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu pusat gravitasi ekonomi dunia. Memiliki potensi pasar yang luas dan sumber daya yang melimpah, kawasan ini menawarkan peluang besar bagi negara-negara yang ingin memperkuat kerja sama ekonomi. Inisiatif seperti Indo-Pacific Economic

Framework for Prosperity (IPEF) hadir sebagai platform strategis untuk mendorong investasi dan perdagangan yang lebih inklusif. IPEF berperan sebagai mekanisme untuk mempererat kerja sama regional dan bilateral, khususnya di bidang perdagangan, rantai pasok, energi bersih, dekarbonisasi dan infrastruktur, pajak dan anti-korupsi. Melalui

kebijakan ini, negara-negara anggota dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. IPEF mendorong kolaborasi dalam mengatasi hambatan perdagangan sekaligus mempromosikan standar yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Untuk memanfaatkan peluang ekonomi dalam kawasan ini,

¹Dewan Redaksi Warta Fiskal

kebijakan masing-masing negara akan merujuk pada teori keunggulan komparatif David Ricardo yang menyatakan bahwa meskipun suatu negara dapat memproduksi semua barang dengan lebih efisien dibandingkan dengan negara lain (keunggulan obasolut), perdagangan tetap akan menguntungkan jika masing-masing negara berspesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif (Ricardo, *On the Principles of Political Economy and Taxation*, 1817). Indonesia memiliki posisi strategis di Indo-Pasifik. IPEF menawarkan kesempatan untuk memperkuat daya saing ekonomi melalui peningkatan infrastruktur digital, diversifikasi mitra dagang, dan perbaikan tata kelola ekonomi. Namun, keberhasilan memanfaatkan IPEF bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk penguatan regulasi investasi dan dukungan kepada sektor UMKM.

Untuk memperoleh keunggulan komparatif dalam kerjasama regional dan bilateral, terutama dalam konteks IPEF, ketimpangan ekonomi di antara negara-negara anggota, perbedaan prioritas kebijakan, serta potensi ketergantungan ekonomi pada kekuatan besar, menjadi kendala dalam pelaksanaan IPEF. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen kolektif, sambil memastikan bahwa kebijakan IPEF tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia. IPEF melibatkan banyak negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda dan beragam prioritas kebijakan. Hal ini dapat menyulitkan Indonesia dalam memastikan bahwa kepentingan nasionalnya seperti perlindungan UMKM dan petani kecil, tidak terpinggirkan dalam kesepakatan multilateral. Indonesia juga masih memiliki ketergantungan yang besar pada pasar tradisional, terutama ekspor

komoditas mentah. Tantangan ini dapat menghambat kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan potensi IPEF yang menuntut diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah dalam rantai pasok global.

Posisi pemerintah dalam kerjasama regional dan bilateral adalah mendorong komitmen nyata dari semua pihak untuk mengatasi tantangan bersama. Indonesia dan negara-negara anggota lainnya harus memastikan bahwa kerangka kerja sama benar-benar mendukung kesejahteraan bersama dan pertumbuhan bersama.

Demikian editorial, selamat membaca.

DAFTAR ISI

FOKUS

- 6** Inisiatif Baru Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan di Kawasan Asia Pasifik
- 11** Rencana Akses Indonesia dalam CPTPP: Potensi dan Tantangan Perdagangan
- 15** Dinamika Kerja Sama Internasional di Tengah Gejolak Geopolitik dan Geoekonomi
- 20** Indonesia di antara Kekuatan Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan dalam Penguatan Stabilitas Keuangan di Kawasan ASEAN+
- 23** Penguatan Posisi Indonesia di ASEAN Melalui Pendalaman Sektor Keuangan

ANALISIS

- 27** Akses Timor Leste ke ASEAN dan Potensi Manfaatnya bagi Indonesia
- 30** Penguatan Posisi Indonesia dalam *Global Value Chain*
- 35** Perkembangan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan dan Jaring Pengaman Keuangan di Kawasan ASEAN+3
- 41** Meneropong Keketuaan Malaysia di Kerja Sama Keuangan ASEAN tahun 2025

44 INSPIRASI, SERBA-SERBI, RENUNGAN

53 FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM



Inisiatif Baru Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan di Kawasan Asia Pasifik

Hendrawan Tri Susilo² & Devi Yanti Bangun³

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui

pencapaian tujuh belas tujuan pembangunan sampai dengan tahun 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan pembiayaan global yang sangat besar. Berkaca dari progres pencapaian SDGs hingga saat ini, OECD

memperkirakan tujuan SDGs tidak akan tercapai sebelum tahun 2076. OECD menghitung kesenjangan pembiayaan SDG tahunan saat ini mencapai USD 3,9 triliun. Pada tahun 2022, kesenjangan untuk membiayai SDG di

²Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

³Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

negara-negara berkembang meningkat sebesar 56%.

Bagi kawasan Asia Pasifik, pembiayaan berkelanjutan mempunyai relevansi yang sangat besar. Kawasan ini merupakan salah satu yang paling rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, yang dapat menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Menurut Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), risiko penduduk Asia Pasifik terhadap bencana enam kali lebih besar dibandingkan dengan penduduk di kawasan lain. Perlu diingat bahwa kawasan ini merepresentasikan 60 persen penduduk dunia. Kawasan ini terdiri dari negara-negara dengan tingkat kemajuan yang beragam sehingga menghadapi tantangan-tantangan beragam yang membutuhkan solusi yang berbeda-beda. Para pemimpin di kawasan ini membutuhkan informasi dan data yang jelas dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk investasi dan pembiayaan terkait iklim. Informasi dan data ini juga diperlukan untuk memudahkan pemantauan kemajuan implementasi strategi dan rencana nol-emisi (*net-zero*) di kawasan.

Dengan latar belakang tersebut, forum keuangan negara-negara anggota kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik atau *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC)

telah menjadikan topik pembiayaan berkelanjutan dalam rangka penanganan isu perubahan iklim sebagai agenda prioritas dalam beberapa tahun terakhir. Agenda ini telah diangkat oleh Selandia Baru di tahun 2021, kemudian dilanjutkan oleh Thailand (2022), Amerika Serikat (2003), dan Peru (2024). Tahun depan topik pembiayaan berkelanjutan akan dibahas di bawah agenda *Fiscal Policy for Sustainable Growth*, satu dari tiga agenda prioritas Korea Selatan sebagai Ketua APEC 2025. Peru, sebagai ketua APEC tahun ini, mengusulkan pembentukan *APEC Sustainable Finance Initiative* (APEC-SFI) sebagai inisiatif baru kerja sama APEC *Finance Ministers Process* (FMP). Secara aklamasi, Para Menteri Keuangan menyetujui dibentuknya *APEC Sustainable Finance Initiative* (APEC-SFI) pada pertemuan mereka di Lima tanggal 21 Oktober 2024.

APEC-SFI dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme yang fleksibel, sukarela, dan tidak mengikat untuk kolaborasi dan koordinasi antara sektor publik, swasta, dan organisasi internasional bagi ekonomi APEC dalam mengkoordinasikan dan mempromosikan sebuah *platform* berbagi informasi dan pengembangan kapasitas sumber daya mengenai isu-isu keuangan berkelanjutan. Pembentukan APEC-SFI memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi

yang memungkinkan bagi pendekatan keuangan berkelanjutan menjadi aset utama untuk meningkatkan potensi ekonomi APEC dalam mendorong praktik keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di kawasan.

Dengan menyediakan informasi dan sumber daya yang komprehensif, APEC-SFI diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai peluang investasi berkelanjutan, manajemen risiko, dan manfaat jangka panjang dalam menyelaraskan kegiatan keuangan dengan tujuan lingkungan dan sosial, serta membantu mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan keuangan masing-masing ekonomi anggota APEC.

Selain itu, dimensi berbagi pengalaman dan pengembangan kapasitas berdasarkan pemahaman bersama di tingkat regional dapat memberdayakan lembaga keuangan, investor, regulator, dan lembaga resmi untuk mengembangkan keahlian dalam keuangan berkelanjutan. Pada akhirnya *platform* ini diharapkan dapat berkontribusi pada promosi pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif sambil mengatasi tantangan global yang mendesak, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial.

Keunikan APEC-SFI

Fokus APEC-SFI sebagai sebuah *platform* untuk berbagi pengalaman dan penguatan kapasitas akan menjadi inisiatif yang unik diantara inisiatif-inisiatif keuangan berkelanjutan yang telah ada. APEC-SFI diharapkan dapat mendorong koordinasi dan kolaborasi yang efektif dengan para pemain di forum global maupun regional, seperti: G20, OECD, *Coalition of Finance Ministers for Climate Action* (CFMCA), ASEAN, Aliansi Pasifik, dan lain-lain. Untuk itu, APEC-SFI diharapkan dapat mempertimbangkan area-area yang dapat mengisi *gap* dari inisiatif-inisiatif di forum lain yang sudah ada serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi, termasuk aspek pengaturan institusinya.

APEC-SFI juga dapat meningkatkan kolaborasi dengan badan-badan dan inisiatif pengembangan kapasitas seperti *International Sustainability Standards Board* (ISSB) *Capacity Building Partnership*, *Global Capacity Building Coalition*, *The Coalition for Capacity on Climate Action* (C3A), *Glasgow Financial Alliance for Net Zero* (GFANZ), dan *platform* pengembangan kapasitas lainnya. Dengan adanya partisipasi organisasi internasional, hal tersebut dapat melengkapi pekerjaan-pekerjaan inisiatif internasional yang sudah ada dalam keuangan berkelanjutan dan diharapkan dapat menghindari duplikasi pekerjaan di antara inisiatif-inisiatif tersebut.

Di sisi lain, dengan karakteristik kerja sama APEC yang unik dan pengalamannya di seluruh ekonomi anggota, forum APEC memiliki potensi yang besar untuk mengambil peran dalam kepemimpinan global. Dalam hal ini, melalui pembentukan APEC-SFI, peran kepemimpinan APEC tersebut diharapkan dapat menyediakan *platform* yang berharga bagi kawasan dalam mengimplementasikan pembiayaan berkelanjutan. Melalui SFI, APEC sebagai kerja sama yang *non-binding* bisa menghasilkan berbagai solusi dan inovasi yang lebih berani.

Platform tersebut menjadi sebuah wadah bersama yang interaktif dan memberikan visibilitas terhadap pekerjaan yang sudah ada dan yang sedang berlangsung. Selain itu, *platform* tersebut memungkinkan setiap pengguna maupun pemangku kepentingan untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan dan terobosan pembiayaan berkelanjutan yang sedang terjadi. Hal ini juga memungkinkan negara-negara yang tidak menjadi bagian dari inisiatif internasional yang ada untuk memperdalam upaya mereka dalam keuangan berkelanjutan.

Struktur dan Governance APEC-SFI

Sebagai sebuah inisiatif yang baru dibentuk, APEC-SFI masih memerlukan waktu untuk menyusun struktur,

format pengelolaan, dan operasionalisasi dari program-program kerjanya. Berdasarkan proposal pembentukannya, struktur APEC-SFI diusulkan dengan format *Friends of the Chair* (atau FoTC), yaitu struktur organisasi (kelompok) yang fleksibel di forum APEC yang telah beroperasi di level teknis atau di level *senior finance officials*. Format FoTC ini biasanya di terapkan di forum APEC EC dan merupakan bentuk inisiatif baru dalam Proses Menteri Keuangan APEC. FoTC sifatnya tidak permanen dan terbuka untuk semua anggota, tetapi hanya negara anggota yang tertarik untuk berpartisipasi yang dapat hadir (tanpa mengharuskan partisipasi semua anggota).

Untuk menjalankan operasional APEC-SFI, Peru sebagai inisiator mengusulkan untuk dibentuk sebuah konvenor dan sekretariat. Tugas konvenor akan memandu kerja FoTC, berkoordinasi dengan Ketua APEC dan didukung oleh sekretariat. Konvenor dapat dipilih dari antara anggota FoTC. Dalam hal ini, Peru mengajukan diri sebagai konvenor pertama (dan diperpanjang untuk satu tahun tambahan jika disetujui oleh ketua APEC dan anggota FoTC). Sekretariat akan sepenuhnya berbeda dari sekretariat APEC. Sekretariat SFI akan memberikan dukungan teknis dan administratif kepada konvenor dan semua anggota FoTC, serta bertanggung jawab atas koordinasi dengan

semua peserta FoTC. Peran sekretariat dapat dilakukan oleh organisasi internasional (yang akan disetujui oleh semua negara anggota APEC).

Keanggotaan APEC-SFI terdiri dari anggota ekonomi APEC yang tertarik, organisasi internasional dengan keahlian di bidang keuangan berkelanjutan, dan APEC Business Advisory Council (ABAC). APEC-SFI juga dapat terbuka untuk partisipasi dari Inisiatif Global lainnya atau para ahli yang terkait dengan keuangan berkelanjutan. Ekonomi APEC, ABAC, dan lima mitra eksternal APEC FMP (ADB, IDB, IMF, OECD, dan Bank Dunia) secara otomatis dapat menjadi anggota. Namun, partisipasi organisasi internasional, inisiatif global, atau ahli di luar lima mitra eksternal FMP harus disetujui oleh semua negara anggota APEC.

Periode pertemuan akan diusulkan oleh konvenor dan harus melalui persetujuan ketua APEC di tahun tersebut. Format pertemuan akan bersifat virtual, kecuali jika para anggotanya memutuskan sebaliknya. Kegiatan – kegiatan di bawah APEC-SFI akan dikoordinasikan oleh konvenor, sekretariat APEC-SFI, ABAC, dan organisasi internasional (selama disetujui oleh Ketua APEC), untuk menghindari timbulnya beban tambahan bagi ekonomi. Dalam hal ini, agenda setiap pertemuan akan diusulkan oleh konvenor, dengan dukungan sekretariat, dan disetujui oleh ketua APEC.

Pertemuan-pertemuan tersebut akan berfokus pada presentasi/laporan dari organisasi internasional atau sektor swasta, dan hanya akan menyertakan presentasi/laporan dari suatu negara jika negara tersebut tertarik untuk melakukannya. Pertemuan-pertemuan ini juga dapat mencakup dialog dengan inisiatif global lainnya, untuk memandu proses perencanaan dan memastikan adanya saling melengkapi, sinergi, dan menghindari duplikasi.

FoTC akan berakhir bersamaan dengan masa keketuaan APEC dan hanya dapat dilanjutkan dengan persetujuan dari ketua APEC tahun berikutnya (melalui pernyataan dalam lampiran *Joint Statement* APEC FMM). Jika ketua APEC yang baru memutuskan untuk tidak melanjutkan FoTC selama masa keketuaannya, FoTC dapat ditangguhkan hingga ketua APEC yang baru memutuskan untuk mengaktifkannya kembali. Hal ini dapat dilakukan karena tahun ini anggota APEC setuju untuk memberlakukan *sunset policy* untuk kelompok kerja atau inisiatif yang sudah tidak produktif.

Manfaat APEC-SFI bagi Indonesia

Pembentukan APEC-SFI diharapkan dapat menjadi *tools* yang penting bagi APEC dalam membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan masing-masing anggotanya. Kendati demikian,

implementasinya perlu mempertimbangkan beberapa hal agar dapat melaksanakan mandatnya dan memberikan manfaat yang besar bagi para anggotanya. Partisipasi aktif anggota, komitmen, serta kepemimpinan dari ketua APEC tahun berjalan menjadi kunci berjalannya inisiatif. Konsultasi secara berkala dengan para anggota perlu dilakukan untuk menetapkan prioritas dan rencana kerja. Sekretariat memiliki peran yang krusial dalam membantu memfasilitasi keterlibatan *stakeholder* eksternal, khususnya dalam memberikan *update* perkembangan program kerja pembiayaan berkelanjutan di luar forum APEC dan dukungan keahlian dalam penguatan kapasitas bagi anggota. Keterlibatan sektor swasta sangat penting untuk memperkaya inisiatif keuangan berkelanjutan dan memiliki peran kunci dalam implementasi dan mendukung bidang-bidang, seperti *advocacy*, *capacity building*, *pilots*, *proofs-of-concepts*, dan *sandboxes*.

Bagi Indonesia, pembentukan APEC-SFI dapat dimanfaatkan untuk mendukung agenda domestik dalam pembiayaan berkelanjutan. Pertama, keterlibatan dalam APEC-SFI akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan *update* informasi terkait praktik-praktik terbaik dalam pembuatan kebijakan tentang pembiayaan berkelanjutan di ekonomi APEC. Kedua, Indonesia dapat mengusulkan program/kegiatan khusus

yang didukung oleh organisasi internasional dan sektor swasta untuk mendukung program pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Ketiga, Indonesia memiliki kepentingan terhadap berbagai isu terkait pembiayaan perubahan iklim, baik *carbon pricing* dan *transition finance*. Indonesia punya kepentingan perdagangan karbon mengingat Indonesia memiliki potensi menjadi salah satu *supplier carbon credit* berbasis *nature* terbesar, sehingga APEC-SFI diharapkan dapat menjadi forum untuk mengundang investor hijau ke Indonesia. Terakhir, pembiayaan berkelanjutan di Indonesia saat ini hanya mampu dipenuhi oleh APBN

sebesar 14%, di tengah berbagai kebijakan fiskal hijau yang inovatif termasuk pemberian insentif perpajakan dan penerbitan berbagai instrumen pembiayaan hijau, diantaranya *green sukuk*, *SDGS bond*, dan *blue bond*. Perlu dukungan berbagai pihak untuk memenuhi *gap* pembiayaan hijau, baik swasta maupun internasional, termasuk mendorong pemenuhan komitmen negara maju untuk mendukung 100 miliar USD/thn. Indonesia, dengan dukungan internasional, sedang membangun proses transisi energi melalui *Energy Transition Mechanism (ETM) platform* yang mendorong *blended finance* untuk tujuan

mengurangi emisi, pensiun dini PLTU, dan mendorong energi terbarukan. APEC-SFI diharapkan dapat menjadi wahana bertukar pengalaman dan keahlian, serta mampu mendorong pendanaan internasional bagi proses transisi tersebut melalui pendanaan yang murah dalam bentuk hibah maupun *concessional loan* agar kebijakan transisi energi di Indonesia menjadi lebih *feasible*.





Rencana Akses Indonesia dalam CPTPP: Potensi dan Tantangan Perdagangan

Maikel Harris⁴

Kerjasama internasional sangat penting bagi Indonesia dalam upaya memperkuat perekonomian dan mencapai tujuan jangka panjang menjadi negara ekonomi maju pada tahun 2045. Pada bulan September 2024 Indonesia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan *Comprehensive and*

Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership atau yang disingkat dengan CPTPP dengan target penyelesaian untuk bergabung pada tahun 2025. Pengajuan Indonesia untuk bergabung dengan CPTPP didukung penuh oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada saat ini.

CPTPP adalah perjanjian perdagangan yang melibatkan 11 negara antara lain Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. CPTPP yang awalnya dikenal sebagai *Trans-Pacific Partnership* (TPP) ditandatangani oleh 11 negara tersebut pada Maret 2018. Secara garis besar tujuan

⁴Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

utama dari CPTPP adalah untuk mengurangi tarif dan mendorong perdagangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja di antara negara-negara anggota.

Dalam hal tujuan CPTPP mendorong perdagangan dilakukan dengan cara menuangkan komitmen dalam perjanjian untuk menghilangkan atau mengurangi tarif sehingga memudahkan dan mengurangi biaya perdagangan antar negara-negara anggota CPTPP dengan tidak mengesampingkan dalam hal fasilitasi perdagangan yang lebih lancar dengan mengurangi hambatan dan meningkatkan akses pasar. Hal lain yang dituju dalam CPTPP adalah dengan memodernisasi aturan-peraturan perdagangan seperti perdagangan digital, hak kekayaan intelektual, dan standar lingkungan.

Lebih lanjut lagi secara detil, dalam perjanjian CPPTPP memberikan akses yang lebih besar ke pasar masing-masing dengan mengurangi tarif pada 95% barang yang diperdagangkan antara negara anggota. Diatur pula ketentuan-ketentuan aturan asal barang atau yang sering dikenal *Rules of Origin* (ROO) yaitu ketentuan tentang produk yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif preferensial CPTPP, secara umum syaratnya adalah pemenuhan *Regional Value Content* (RVC) yang

sebagian besar komponennya berasal dari negara-negara CPTPP.

Hal lain yang penting diatur dalam CPPTP antara lain adalah perlindungan Investasi adalah dengan menerapkan aturan *National Treatment* yaitu investor dari negara CPTPP menerima perlakuan yang sama dengan perusahaan domestik sehingga diharapkan akan dapat lebih mendorong investasi asing masuk kedalam antar negara-negara anggota. Terakhir yang tidak kalah penting perjanjian ini juga mencakup ketentuan untuk memfasilitasi perdagangan digital, memastikan data dapat mengalir bebas antara negara anggota sambil mempertahankan standar perlindungan data yang tinggi.

Potensi Manfaat CPTPP

CPTPP mencakup pasar lebih dari 500 juta orang dan menyumbang sekitar 13% dari ekonomi global. Perjanjian ini dipandang sebagai pintu gerbang ke kawasan Indo-Pasifik, yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang. Perjanjian ini terbuka untuk negara negara lain bergabung, perkembangan terakhir negara Inggris akan bergabung dalam CPTPP secara resmi pada akhir tahun 2024, dan juga negara-negara lainnya yang menyatakan ketertarikannya seperti Thailand dan Korea Selatan.

Dengan bergabung dalam CPTPP, negara-negara dapat memperoleh manfaat dari peningkatan peluang perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan hubungan yang lebih kuat dengan beberapa ekonomi paling dinamis di dunia. Untuk Indonesia bergabung dengan CPTPP diharapkan dapat membuka pasar baru bagi produk Indonesia, terutama ke negara-negara yang sebelum kurang terjangkau karena belum mempunyai perjanjian perdagangan dengan Indonesia terutama untuk negara-negara Amerika Latin (Meksiko, Peru, dan Chili), dan Inggris, sehingga diharapkan dapat meningkatkan volume ekspornya dengan adanya penghapusan tarif dan hambatan perdagangan pada sebagian besar barang dan jasa antar negara anggota CPTPP.

Pangsa pasar Amerika Latin terutama Meksiko sangat berpotensi, berdasarkan data *Trade Map* pangsa impor Meksiko pada tahun 2023 sebesar 42,5% dari total barang impor yang masuk ke negara-negara Amerika Latin. Meksiko juga nanti bisa menjadi *hub* bagi negara-negara Amerika Latin lainnya apabila Indonesia ingin membuka pasar baru di negara lainnya di kawasan tersebut yang tidak mempunyai perjanjian perdagangan dengan Indonesia.

Tabel 1. Share Pasar Impor di Kawasan Amerika Latin dan Uni Eropa

Importers Country	Imported value in 2023*	Import share
Latin America and the Caribbean Aggregation	1.407.289.486	100,00%
Mexico	598.475.395	42,50%
Chile	80.492.407	5,70%
Peru	52.163.927	3,70%
Other Latin America and the Caribbean Country (37 Countries)	676.157.757	48,00%
European Union (EU 28) Aggregation	7.607.633.606	100,00%
Germany	1.469.735.378	19,30%
United Kingdom	791.855.405	10,40%
France	775.128.724	10,20%
Netherlands	664.131.324	8,70%
Italy	639.928.812	8,40%
Belgium	550.854.780	7,20%
Other EU Country (22 Countries)	2.715.999.183	35,70%

Sumber: Trademap, diolah.

*USD Dollar Thousand

Inggris yang akan masuk dalam CPTPP pada akhir tahun 2024 juga akan menjadi pasar potensial bagi Indonesia, dimana Inggris merupakan peringkat terbesar pangsa Impor di Uni Eropa (EU 28) sebesar 10,4% dari total pangsa Impor EU 28. Saat ini memang Indonesia sedang dalam penyelesaian negoisasi perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa dalam skema *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU CEPA) namun Inggris tidak termasuk dalam perjanjian tersebut.

Dengan akses ke berbagai pasar baru, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan mendiversifikasi tujuan eksportnya. Ini dapat membantu meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko yang

terkait dengan fluktuasi pasar tertentu.

Perjanjian ini juga diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor asing dengan adanya lingkungan investasi yang lebih transparan, yang dapat mendorong investasi dari negara-negara anggota ke Indonesia. Investasi ini dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk ekspor Indonesia dalam keanggotaan juga bisa mendorong reformasi struktural di dalam negeri, yang dapat meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Terakhir, dalam CPTPP juga mencakup ketentuan untuk memfasilitasi perdagangan digital, hal yang penting bagi produk dan layanan digital Indonesia yang ingin menembus pasar

internasional.

Dengan demikian dengan adanya rencana bergabung dalam CPTPP, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya di panggung global dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan yang lebih terbuka dan investasi yang lebih besar.

Tantangan Perdagangan

Proses akses Indonesia ke CPTPP menawarkan banyak peluang manfaat sebagai salah satu *Free Trade Agreement* (FTA) yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan internasional dan memperkuat hubungan ekonomi antar negara untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun juga tidak akan terlepas dari tantangan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak.

Dari sekian banyak, salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam memanfaatkan FTA adalah pemenuhan *Rules of Origin* (ROO). ROO sendiri adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan asal barang dalam perdagangan internasional. ROO penting untuk memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari negara-negara yang terlibat dalam FTA yang dapat menikmati tarif yang diperjanjikan. Kriteria ini mencakup berbagai aspek seperti proses produksi,

bahan baku, dan nilai tambah lokal. Kompleksitas Kriteria ROO Setiap FTA memiliki kriteria ROO yang berbeda-beda, begitu juga nanti pada CPTPP, yang sering kali kompleks dan sulit dipenuhi oleh produsen lokal. Hal ini memerlukan terutama pemahaman mendalam dan penyesuaian proses produksi yang tidak selalu mudah dilakukan.

Untuk memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh CPTPP, Indonesia perlu melakukan penyesuaian pada berbagai peraturan dan regulasi, tantangannya adalah bagaimana agar hal-hal yang diperjanjikan nantinya tidak bertentangan dan diharmonisasikan dengan kebijakan domestik yang sudah ada, misalnya saja kebijakan hilirisasi dan kebijakan larangan ekspor Indonesia. Proses ini bisa memakan waktu dan membutuhkan komitmen politik yang kuat bagi Pemerintah.

Bergabung dengan CPTPP berarti Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara anggota lainnya yang mungkin memiliki keunggulan kompetitif di beberapa sektor. Misalnya, produk-produk dari negara seperti Vietnam dan Malaysia yang sudah lebih dulu menjadi anggota CPTPP bisa menjadi pesaing berat bagi produk Indonesia.

Tantangan lainnya bagi Indonesia yaitu CPTPP mendorong praktik perdagangan yang ramah lingkungan dan

berkelanjutan. Indonesia perlu mengantisipasi bahwa kebijakan dan praktik industrinya sejalan dengan komitmen ini. Hal ini bisa menjadi tantangan Indonesia, sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam yang melimpah, beberapa tantangan utama yang dihadapi diantaranya keterbatasan infrastruktur dan teknologi industri di beberapa sektor untuk mendukung praktik perdagangan tersebut serta adanya biaya produksi yang lebih tinggi yang menyebabkan meningkatnya biaya operasional industri dan dapat mengurangi daya saing industrinya.

Mengadopsi praktik perdagangan yang ramah lingkungan sering kali memerlukan biaya produksi yang lebih tinggi. Misalnya, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan atau teknologi produksi yang lebih bersih dapat meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional, terutama jika negara-negara pesaing tidak menerapkan standar lingkungan yang sama.

Perjanjian perdagangan yang selama ini diimplementasikan oleh Indonesia dengan negara-negara mitra seyogyanya tidak bisa terlepas dari analisa potensi manfaat yang akan didapatkan ketika Indonesia memutuskan untuk bergabung. Tujuan utama tentunya adalah akses pasar yang lebih luas dan peningkatan investasi asing yang masuk

ke Indonesia. Bagi mata uang, selain peluang manfaat yang ingin dicapai terdapat sisi risiko dan tantangan yang dihadapi pada saat masuk ke dalam pasar yang lebih luas, dan tentunya diperlukan asesmen yang tepat dan koordinasi yang kuat antara Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meminimalisasi risiko dan tantangan tersebut.

Dengan resminya Pemerintah Indonesia mengajukan untuk bergabung dengan CPTPP maka seharusnya pemerintah dan sektor-sektor terkait segera berkoordinasi untuk mempelajari dan melakukan telaahan hal-hal yang sudah diperjanjikan dalam CPTPP. Selanjutnya pemerintah dapat menyusun program atau kegiatan yang perlu dipersiapkan sebelum CPTPP mulai diimplementasikan termasuk didalamnya penyesuaian dan harmonisasi regulasi domestik dengan tidak melewati batas kebijakan kepentingan nasional. Selain itu perlu dilakukan analisis ketentuan asal barang dan dukungan yang perlu dilakukan agar tujuan ekspansi pasar dapat dilakukan oleh industri domestik yang memiliki daya saing termasuk industri yang mendorong praktik ramah lingkungan.



Dinamika Kerja Sama Internasional di Tengah Gejolak Geopolitik dan Geoekonomi

Martin Hasiholan Lumbantobing⁵ dan Nugroho Joko Sutanto⁶

Perkembangan Geopolitik Dan Geoekonomi Global

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan politik antar kekuatan utama dunia berubah menjadi perang terbuka di beberapa wilayah. Perang Rusia melawan Ukraina yang meletus sejak tahun 2022 diyakini sebagai perang antara blok Barat yang dikomandoi Amerika Serikat dengan Rusia sebagai lawannya. Sementara itu, pertempuran di kawasan Timur Tengah dimana Israel menggempur wilayah Gaza, Palestina dan meluas ke wilayah Lebanon, serta Suriah, bahkan juga melancarkan serangan ke Iran dan Yaman sehingga menambah tensi

ketegangan geopolitik yang terjadi secara global.

Di kawasan Asia Timur, di mana Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Korea Utara diapit oleh negara-negara yang mendapatkan sokongan penuh secara politik dan militer dari Amerika Serikat (AS) serta sekutunya, sangat berpotensi menjadi kancah perang terbuka baru. Jika terjadi perang terbuka di kawasan Asia Timur, maka dampaknya akan secara langsung berpengaruh kepada Indonesia, karena di Asia Tenggara terdapat salah satu basis militer Amerika Serikat dan menjadi jalur utama dari Australia yang merupakan sekutu Amerika Serikat

menuju kawasan Asia Timur.

Tumbuhnya Tiongkok sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dan militer dunia sejak tahun 1980-an menjadi ancaman bagi hegemoni tunggal AS pasca runtuhnya Uni Soviet. Tiongkok menjelma sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia menggeser Jepang. Hal ini menjadi tantangan bagi AS untuk mempertahankan hegemoni ekonomi dan politik globalnya, mengingat Tiongkok tidak berada di garis yang sama dengan AS dalam politik dunia.

Pergesekan politik internasional di antara negara-negara besar secara perlahan merembet ke kebijakan

⁵Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

⁶Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

perdagangan. Serangan ekonomi yang paling nyata terjadi pada tahun 2018 saat Amerika Serikat secara terbuka melakukan perang dagang dengan mengenakan tarif 25% untuk besi baja dan barang lain dengan nilai impor US\$34 miliar dan 10% untuk produk aluminium. Hal tersebut kemudian dibalas oleh Tiongkok dengan mengenakan tarif atas impor US\$50 miliar terhadap produk Amerika Serikat yang masuk ke Tiongkok. Selanjutnya pada tahun 2019, AS mengenakan tarif 10%-25% terhadap impor Tiongkok senilai US\$500 miliar. Perang dagang antara kedua negara tersebut masih terus berlanjut, bahkan setelah Presiden Donald Trump digantikan oleh Joe Biden. Terkini, AS menerapkan 100% bea masuk terhadap mobil listrik asal Tiongkok, dimana tindakan tersebut juga diikuti oleh European Union (EU).

Dinamika yang sama juga terjadi antara EU dan Rusia sebagai dampak perang antara Rusia dan Ukraina. EU mengenakan embargo atas sejumlah produk ekspor Rusia, termasuk minyak mentah, LPG, batu bara, dan baja. Selain itu, kedua negara juga saling melakukan pembekuan aset publik dan swasta. Sekitar US\$300 miliar aset Rusia telah dibekukan oleh EU dan AS. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat juga mendiskusikan penggunaan aset Rusia untuk membantu proses *recovery* di Ukraina.

Kebijakan-kebijakan negara-negara tersebut kemudian berdampak terhadap perdagangan dunia dan nilai komoditas dunia. Nilai perdagangan Rusia mengalami penurunan drastis yang tercermin pada penurunan cadangan devisa Rusia sebesar sekitar US\$350 miliar.

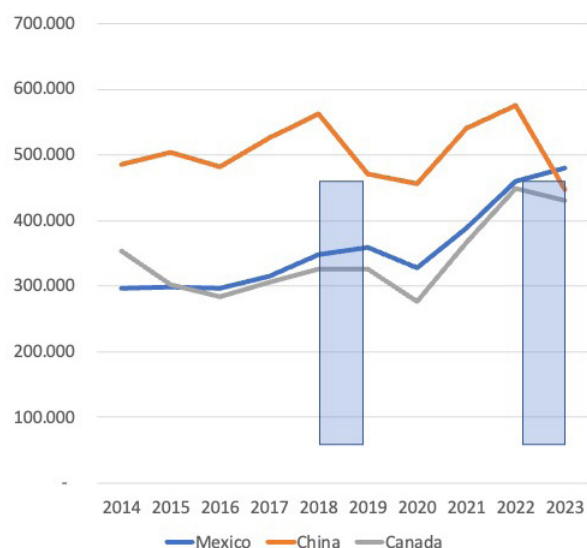
Harga komoditas seperti minyak, gas, dan batu bara mengalami peningkatan signifikan. Lebih lanjut, untuk produk minyak juga dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan terjadinya fluktuasi harga komoditas tersebut di pasar. Hal ini kemudian memicu inflasi yang tinggi di tengah proses pemulihan ekonomi dunia pascapandemi COVID-19.

Reaksi Negara-negara Utama dan Implikasi terhadap Kerja sama Internasional

Fenomena Perdagangan (*Friendshoring, Nearshoring, Trade Circumvention*)

Friksi politik dan ekonomi global yang terjadi mengakibatkan pergeseran hubungan dagang dan investasi di dunia. Perselisihan politik global yang terjadi

Grafik 1. Impor Amerika Serikat dari Cina, Meksiko, dan Kanada (USD mio)



Sumber: ITC Trade Map, diolah

Tabel 1. Porsi Impor Amerika Serikat dari 10 Negara Sumber Impor Utama

	2014	2017	2019	2023
Mexico	12.3%	13.1%	14.0%	15.1%
China	20.2%	21.9%	18.4%	14.1%
Canada	14.7%	12.7%	12.7%	13.6%
Germany	5.2%	5.0%	5.1%	5.1%
Japan	5.7%	5.8%	5.7%	4.8%
Korea, Republic	3.0%	3.1%	3.1%	3.8%
Viet Nam	1.3%	2.0%	2.7%	3.7%
Taipei	1.7%	1.8%	2.2%	2.8%
India	1.9%	2.1%	2.3%	2.8%
Ireland	1.4%	2.0%	2.4%	2.6%

Sumber: ITC Trade Map, diolah

secara perlahan mengubah rantai pasok atau *supply chain* yang ada di dunia. Negara-negara cenderung mengalihkan ekspor-impor ke negara-negara yang berdekatan yang dikenal dengan *nearshoring* atau ke negara-negara yang memiliki ideologi atau kebijakan politik luar negeri yang mirip maupun berisiko rendah atau *friendshoring*.

Secara historis, AS menjadikan Tiongkok sebagai pemasok atau *supplier* utama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksinya. Data dari ITC Trade Map menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Tiongkok merupakan negara sumber impor utama AS, dengan nilai impor sebesar US\$486,2 miliar atau setara dengan 20,2% dari total impor AS. Selain dari Tiongkok, AS juga melakukan impor yang cukup besar dari Kanada (US\$354,1 miliar) dan Meksiko (US\$296,8 miliar). Namun demikian, setelah era *trade*

war, nilai dan porsi impor AS dari Tiongkok mengalami penurunan, meskipun Tiongkok masih menjadi salah satu sumber impor utama bagi AS. Di sisi lain, nilai dan porsi impor AS dari Meksiko terus mengalami peningkatan. Trend ini berlanjut hingga pada tahun 2023 nilai impor AS dari Tiongkok mengalami penurunan sebesar 22% menjadi US\$448 miliar. Sedangkan impor AS dari Meksiko mengalami kenaikan 5% menjadi US\$480 miliar, menempatkan Meksiko menjadi negara sumber impor utama AS menggantikan peran Tiongkok.

Tiongkok sebagai negara yang menerima dampak dari kebijakan *friendshoring* dan *nearshoring* dari AS mencoba mengubah strategi perdagangannya. Tiongkok melalui strategi China+1 melakukan strategi *trade circumvention* yaitu strategi penataan ulang rute perdagangan untuk menghindari berbagai sanksi

atau hambatan perdagangan. Melalui strategi ini, Tiongkok mengalihkan jalur perdagangannya ke negara-negara lain yang kemudian mengolah dan menjual produk tersebut ke AS. Dari grafik 2 yang memuat data ekspor Tiongkok ke beberapa negara, terlihat bahwa pada saat impor AS dari Tiongkok turun, nilai ekspor Tiongkok ke Meksiko justru mengalami kenaikan, seperti yang terjadi pada tahun 2019 dan 2023 dari USD46,38 miliar menjadi USD81,5 miliar. Dinamika perdagangan ini melibatkan mekanisme ekspor barang input dari Tiongkok ke Meksiko yang kemudian diolah dan diekspor dalam bentuk produk yang lebih hilir ke AS. Perubahan pola ini tidak terlepas dari peningkatan penanaman modal asing dari Tiongkok ke Meksiko.

Rute lain yang diambil oleh Tiongkok adalah melalui Vietnam. Sebagaimana digambarkan pada tabel di atas, di saat impor Amerika

Grafik 2. Ekspor Tiongkok ke Jepang, Korea, Meksiko, dan Vietnam (USD Juta)



Sumber: ITC Trade Map, diolah

Gambar 1. Ilustrasi Skema Trade Circumvention Tiongkok



dari Tiongkok mengalami penurunan (dari USD562,7 miliar di tahun 2018 menjadi USD470,95 miliar di tahun 2019), impor AS dari Vietnam justru mengalami peningkatan (dari USD51,26 miliar di tahun 2018 menjadi USD69,16 miliar di tahun 2019), diiringi peningkatan ekspor Tiongkok ke Vietnam (USD84,02 miliar menjadi USD97,87 miliar).

Dinamika Kerja Sama Kawasan-Pembentukan IPEF

Menyadari situasi global yang semakin rumit dan penuh dinamika, AS menyusun strategi baru untuk menggalang kerja sama di Kawasan Asia Pasifik, dengan melibatkan salah satu kekuatan ekonomi di Asia Selatan, yakni India dalam kerja sama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) yang diinisiasi pada pertengahan tahun 2022. Kerja sama yang melibatkan 14 negara anggota ini mencakup 32,2% populasi dunia yang mewakili hampir 40% GDP dunia. Total nilai perdagangan kawasan IPEF mencakup sekitar 28,93% total perdagangan global.

Saat ini , IPEF yang terdiri atas empat Pilar, sudah disepakati sejak bulan Juli 2024 dan tiga pilarnya di antaranya sudah berlaku efektif yakni pilar rantai pasok, pilar ekonomi bersih, dan pilar ekonomi adil, meski belum semua negara anggota meratifikasinya secara penuh. Indonesia saat ini dalam proses meratifikasi

perjanjian IPEF untuk pilar II, III, dan IV. Pilar Perdagangan masih terjadi tarik ulur kepentingan sehingga sampai saat ini belum ada kesepakatan final mengenai isu perdagangan di IPEF.

Ke depan, IPEF diharapkan menjadi semacam *common ground standard* bagi negara anggotanya atas isu-isu di pilar yang disepakati. IPEF dapat berkembang menjadi wadah konsolidasi AS di kawasan Asia-Pasifik dan India atas isu-isu di luar ekonomi, khususnya yang menyangkut kepentingan AS dan sekutunya di wilayah tersebut. Bisa jadi IPEF akan dipakai sebagai alat untuk memuluskan kepentingan politik AS di wilayah Indo-Pasifik di masa depan.

Perluasan Keanggotaan dan Pengembangan Inisiatif BRICS

BRICS merupakan forum ekonomi global yang dibentuk pada tahun 2006 dengan anggota pendiri Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan BRICS terus bertambah dengan bergabungnya Uni Emirat Arab, Iran, Mesir, dan Ethiopia sebagai anggota penuh. Selain itu, negara-negara tetangga dengan perekonomian besar, seperti Thailand dan Malaysia, telah menunjukkan minat untuk bergabung dengan organisasi ini. Sementara itu, Arab Saudi belum menjadi anggota resmi, tetapi turut berpartisipasi dalam kegiatan

BRICS sebagai negara undangan.

Awalnya BRICS memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggotanya. Namun demikian, seiring dengan dinamika situasi geopolitik yang melibatkan Rusia dan negara-negara Eropa serta AS dan adanya situasi ketegangan geoekonomi yang melibatkan AS dan Tiongkok, maka BRICS mulai membahas isu-isu terkait perdagangan dan memposisikan organisasi ini sebagai pesaing bagi organisasi D7, yang beranggotakan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk memperlemah dominasi Dolar AS terus dibahas di dalam pertemuan-pertemuan BRICS.

Salah satu inisiatif tersebut adalah penggunaan *multicurrency* untuk melakukan perdagangan di antara negara-negara BRICS, salah satunya melalui kebijakan *local currency settlement*. Bahkan pada pertemuan terakhir BRICS semakin mulai memperkenalkan ide tentang mata uang BRICS. Negara-negara BRICS juga terus mengembangkan ide untuk penggunaan instrumen pembayaran lain guna mengurangi penggunaan US Dollar, seperti *cryptocurrencies*, *digitalized trade mechanisms*, dan *hubs for commodities trading*. Beberapa negara BRICS, seperti Tiongkok juga melakukan pembelian

emas dalam skala besar untuk mendiversifikasi cadangan devisanya, dengan tujuan mengurangi porsi instrumen Dolar AS di dalam portofolionya.

Implikasi dan Reaksi Indonesia

Indonesia yang berpedoman kepada politik luar negeri bebas-aktif tidak mau terjebak dalam ketegangan geopolitik yang semakin memanas. Indonesia berusaha menyeimbangkan posisinya di tengah perseteruan antar negara atau kelompok negara yang terjadi di berbagai kawasan. Hal ini tercermin dari kebijakan Pemerintah Indonesia untuk selalu bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok.

Indonesia bergabung ke dalam kerja sama yang dipandang sebagai bentukan kelompok Amerika Serikat yaitu IPEF, tetapi juga melakukan pendekatan kepada kelompok RRT – Rusia dengan mendaftar sebagai anggota BRICS. Indonesia juga melakukan aksesi sebagai anggota FATF dan OECD yang notabene merupakan simbol pergaulan negara maju yang diketuai oleh AS dan negara-negara Eropa, namun di sisi lain Indonesia tetap aktif dalam kerja sama Organisasi Konferensi Islam, G77, gerakan Non-blok, dan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Tentu saja pilihan Indonesia mempunyai implikasi

positif dan negatif. Dari sisi positifnya, Indonesia tidak akan terseret ke dalam pusaran konflik politik dan militer dengan negara-negara yang sedang bersitegang. Dengan demikian, Indonesia akan relatif tenang dan tidak terganggu dengan situasi geopolitik global, sehingga pembangunan di dalam negeri tidak akan banyak terpengaruh. Selain itu, dengan bersikap netral atas ketegangan geopolitik dunia tersebut, Indonesia dapat fokus mengalokasikan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang lebih produktif.

Namun di sisi yang lain, dengan tidak memihaknya Indonesia kepada salah satu kubu yang saling bersaing secara global, menyebabkan dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer terbesar tersebut menjadi tidak maksimal. Kelompok negara-negara adidaya yang saling berkontestasi tersebut menjadi kurang suportif kepada Indonesia, karena berpotensi menjadi “poros ketiga” dalam percaturan ekonomi, politik dan militer global, jika Indonesia menjadi lebih kuat.

Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sangat *concern* terhadap penguatan kemampuan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Rencana pembelian

Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) dari Prancis, namun di sisi lain juga menjalin kerja sama militer dengan Rusia, sangat menarik untuk diamati. Beberapa program kerja sama militer dengan negara-negara lain juga bisa diartikan sebagai langkah strategis Indonesia untuk menjaga netralitas hubungan dengan blok-blok yang saling bersaing dalam persaingan politik dan militer global.



Indonesia di antara Kekuatan Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan dalam Penguatan Stabilitas Keuangan di Kawasan ASEAN+3

Ari Sulistyowati⁷

Krisis keuangan Asia yang terjadi di tahun 1997/1998 menjadi pelajaran penting bagi negara-negara di ASEAN dan Asia Timur mengenai pentingnya keberadaan mekanisme di tingkat kawasan yang mampu menyediakan dukungan likuiditas yang cukup dan tepat waktu pada saat terjadi krisis. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan negara-negara di kawasan tersebut, terutama Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina dan Korea Selatan atas kebijakan IMF dalam membantu penanganan krisis keuangan yang justru semakin memperburuk kondisi

ekonomi di masing-masing negara tersebut. Adanya kesamaan pengalaman di antara negara-negara tersebut meningkatkan kesadaran mengenai ketergantungan di kawasan ASEAN dan Asia Timur. Hal tersebut juga yang mendorong kebutuhan untuk melaksanakan aksi bersama untuk memperdalam kerja sama di sektor keuangan di antara negara-negara di kedua kawasan tersebut. Kerangka kerja sama yang kemudian dikenal sebagai ASEAN+3 ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan membentuk jaringan pengamanan keuangan di

kawasan ASEAN+3.

Proses kerja sama ASEAN+3 kemudian mengarah pada pembentukan inisiatif yang disebut dengan *Chiang Mai Initiative (CMI)* pada tahun 2000. Melalui inisiatif ini, negara-negara ASEAN+3 sepakat mengenai dukungan likuiditas yang mendesak dalam penanganan krisis keuangan melalui kerangka pertukaran mata uang secara bilateral (*bilateral swap arrangement/BSA*) di antara anggota-anggotanya. BSA di CMI merupakan perluasan dari mekanisme pertukaran mata uang bilateral ASEAN yang telah ada sejak tahun 1977.

⁷Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

Inisiatif kerja sama sektor keuangan di ASEAN+3 terus mengalami perkembangan untuk menjaga relevansi dalam memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya. Pada tahun 2009, CMI bertransformasi menjadi *Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM)*, di mana mekanisme swap bukan lagi dilakukan secara bilateral namun secara multilateral. CMIM menjadi aransemen keuangan di kawasan untuk menyediakan bantuan likuiditas yang mendesak dan dilakukan secara kolektif. Hingga saat ini, mekanisme penguatan aransemen keuangan di kawasan terus dikembangkan termasuk pembuatan fasilitas baru di bawah CMIM, salah satunya adalah pembiayaan cepat (*rapid financing facility*) yang disepakati oleh para menteri dan gubernur bank sentral ASEAN+3 tahun 2023.

Kerangka kerja sama ASEAN+3 di jalur keuangan juga telah berhasil mendirikan *ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO)* pada tahun 2011 yang berfungsi sebagai unit *surveillance* makroekonomi, pemberi rekomendasi kebijakan, operator CMIM dan memberikan pembangunan kapasitas bagi negara-negara di kawasan. Sejak tahun 2016, AMRO telah berkembang menjadi sebuah organisasi internasional di kawasan dengan mandat bukan hanya untuk melakukan fungsi monitoring dan *surveillance* ekonomi tetapi juga memberikan nasihat dan

rekomendasi kebijakan serta melakukan pembangunan kapasitas negara-negara di ASEAN+3.

Di balik berkembangnya inisiatif-inisiatif kerja sama ASEAN+3, peran negara-negara *Plus Three* (Jepang, Tiongkok, Korea Selatan) sangat besar. Dengan sumber daya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, negara-negara *Plus Three* memiliki pengaruh dalam membentuk agenda serta pengambilan keputusan di kerangka kerja sama ASEAN+3. Masing-masing negara *Plus Three* memiliki agenda dan kepentingan masing-masing yang turut mempengaruhi dinamika kekuatan di dalamnya. Rivalitas yang paling nyata adalah antara Jepang dan Tiongkok.

Pada saat krisis keuangan tahun 1998, Jepang berperan besar dalam mendukung stabilisasi ekonomi dan keuangan di kawasan melalui Inisiatif Miyazawa. Inisiatif ini berbentuk paket dukungan keuangan senilai USD 30 miliar untuk penanganan dan pemulihan krisis di Indonesia, Malaysia, Korea dan Thailand. Inisiatif Miyazawa berbentuk pengaturan swap secara bilateral (*bilateral swap arrangement*) yang kemudian menjadi referensi pembentukan CMI di ASEAN+3 yang kemudian berkembang menjadi CMIM.

Di sisi lain, Tiongkok menginisiasi penggunaan mata uang lokal di dalam CMIM sebagai salah satu

cara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dollar dan kerentanan ekonomi di kawasan dari guncangan eksternal. Inisiatif ini didukung oleh negara-negara ASEAN+3 lainnya dengan berkaca pada pengalaman yang terjadi pada saat krisis keuangan global di mana negara-negara yang sangat tergantung dengan dollar AS turut terkena dampak rambatan dari krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat. Di dalam kerangka CMIM, mekanisme penggunaan mata uang lokal terus didorong sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat CMIM.

Fasilitas pembiayaan melalui kerangka CMIM mensyaratkan negara-negara anggota ASEAN+3 untuk memberikan komitmen dana yang nilainya berbeda-beda menyesuaikan ukuran ekonomi dan kapasitas keuangan masing-masing. Jepang dan Tiongkok merupakan kontributor terbesar di CMIM yang mencapai 32% dari total kontribusi CMIM sebesar USD 240 miliar. Sementara itu, Korea Selatan memiliki porsi sebesar 16%. Besarnya komitmen kontribusi yang diberikan berbanding lurus dengan besarnya kekuatan voting dalam proses pengambilan keputusan terkait operasionalisasi CMIM.

Sebagaimana halnya dengan CMIM, AMRO sebagai organisasi internasional yang dibentuk melalui kerja sama ASEAN+3 juga menerapkan sistem kontribusi berdasarkan ukuran ekonomi negara-negara

anggotanya. Kontribusi dari negara-negara anggota tiap tahunnya digunakan untuk mendanai operasionalisasi AMRO. Kontributor terbesar adalah Jepang dan Tiongkok dengan nilai yang sama, kemudian disusul Korea Selatan. Besarnya kontribusi dari *Plus Three* memberikan ruang yang lebih besar bagi ketiga negara tersebut untuk mengisi posisi jabatan tinggi dan strategis di AMRO. Hal ini kemudian berdampak pada perumusan dan implementasi kebijakan dan output AMRO yang sering kali bias.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana posisi Indonesia dalam kompetisi yang terjadi di antara negara-negara *Plus Three* ini? Meskipun terdapat pengaruh negara-negara *Plus Three* yang besar dalam kerangka kerja samanya, ASEAN+3 menganut prinsip kesetaraan di antara negara anggotanya dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus. Prinsip-prinsip ini yang menjadi pedoman bagi ASEAN termasuk Indonesia untuk menyuarakan kepentingannya dan secara proaktif terlibat dalam perumusan inisiatif-inisiatif yang mendukung penguatan stabilitas keuangan di Kawasan ASEAN+3.

Sejak pertama bergabung dalam ASEAN+3, Indonesia secara proaktif turut serta dalam merumuskan inisiatif-inisiatif yang mendukung penguatan stabilitas keuangan di Kawasan ASEAN+3, dari pembentukan CMI hingga CMIM. Indonesia turut

berkontribusi pada CMIM sebesar 3,79% dari total kontribusi. Dibandingkan dengan negara-negara *Plus Three* memang sangat jauh. Hal ini juga berimplikasi pada kecilnya kekuatan voting untuk pengambilan keputusan yang penting di forum tersebut. Meskipun demikian, ketika dalam forum pembahasan inisiatif-inisiatif di dalam kerangka ASEAN+3, Indonesia menempatkan diri sebagai pemimpin ASEAN yang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara di ASEAN yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Pada keketuaannya di ASEAN+3 tahun 2011, Indonesia bersama-sama dengan Jepang berhasil menyelesaikan proses pendirian AMRO sebagai unit *surveillance* untuk CMIM serta mendorong negara-negara ASEAN+3 lainnya untuk dapat menyusun *timeline* peningkatan status AMRO sebagai organisasi internasional. Pada keketuaan berikutnya di tahun 2023, Indonesia kembali mendorong perbaikan AMRO sebagai organisasi internasional yang memiliki keterwakilan yang lebih seimbang antara negara-negara *Plus Three* dengan perwakilan ASEAN. Selama ini posisi di level manajemen senior AMRO selalu diisi oleh perwakilan dari *Plus Three* yang berimplikasi pada perumusan dan implementasi kebijakan serta output-output yang dihasilkan oleh AMRO kurang merepresentasikan kepentingan dan kebutuhan

negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, Indonesia dengan dukungan dari negara-negara ASEAN lainnya berhasil membuat struktur tambahan di tingkat manajemen senior di dalam organisasi AMRO untuk diisi oleh perwakilan dari negara ASEAN. Dengan adanya representasi ASEAN di jabatan manajemen senior AMRO, diharapkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh AMRO dapat benar-benar sesuai dengan kebutuhan negara-negara di ASEAN.

Ke depan, Indonesia tetap perlu mengedepankan prinsip sentralitas ASEAN dalam menghadapi kekuatan *Plus Three* sehingga daya tawar menjadi lebih besar. Karena adanya kompetisi di antara negara-negara *Plus Three*, Indonesia dapat bekerja sama dengan negara *Plus Three* yang memiliki kepentingan yang sama. Strategi ini akan sangat membantu untuk pencapaian inisiatif-inisiatif yang dibahas dalam kerangka kerja sama keuangan ASEAN+3. Indonesia juga dapat memanfaatkan pendanaan bantuan teknis yang dialokasikan oleh *Plus Three* untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan kapasitas yang dapat memperkuat membangun kapasitas dan kemampuan dalam memperkuat daya tahan dan stabilitas keuangan di dalam negeri.



Penguatan Posisi Indonesia di ASEAN Melalui Pendalaman Sektor Keuangan

Wignyo Parasian⁸

Sektor keuangan yang stabil dan kuat merupakan salah satu faktor esensial dalam menopang kemajuan perekonomian Indonesia. Dengan memegang status sebagai negara terbesar di Kawasan ASEAN, tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki prospek ekonomi yang cerah dalam beberapa tahun mendatang. Namun, rendahnya tingkat daya saing secara regional menjadi tantangan bagi Indonesia guna memperkuat posisinya di ASEAN yang tercermin dari kurang memadainya infrastruktur yang dimiliki. IMD World Competitiveness 2024 menunjukkan bahwa

peringkat infrastruktur Indonesia berada di posisi 52 di bawah Singapura (posisi 4), Malaysia (posisi 35), dan Thailand (Posisi 43). Tantangan lainnya yakni masih rendahnya kapasitas penghimpunan dana oleh sektor keuangan Indonesia. Data dari The Global Economy memperlihatkan aset bank per Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya sebesar 55,7 persen, jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain, seperti Singapura (507,0), Malaysia (188,8), dan Thailand (141,0). Alhasil, pendalaman sektor keuangan penting untuk segera dilakukan karena selain dapat meningkatkan stabilitas ekonomi, Indonesia

juga berpotensi untuk menarik investasi asing lebih banyak serta memiliki peran lebih besar dalam kerja sama regional. Ketiga hal tersebut dapat menjadi kunci bagi Indonesia dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta siap untuk mengantisipasi dampak negatif dari risiko global ke depan.

Pendalaman sektor keuangan didefinisikan sebagai upaya dalam memperluas serta memperkuat layanan keuangan kepada masyarakat maupun bisnis pada sebuah perekonomian. Cakupan upaya ini antara lain meliputi peningkatan aksesibilitas masyarakat

⁸Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

terhadap produk keuangan, peningkatan kualitas layanan keuangan, termasuk tingkat reliabilitasnya, serta pengembangan produk keuangan, misalnya *digital wallet*. Pendalaman sektor keuangan sangat bermanfaat dalam meningkatkan efisiensi karena transaksi akan menjadi lebih cepat dengan biaya yang relatif lebih rendah. Lebih lanjut, peningkatan inklusi keuangan akan mendorong lebih banyak individu maupun bisnis kecil untuk mengakses berbagai layanan keuangan, misalnya tabungan dan pinjaman. Dengan demikian, manfaat pendalaman sektor keuangan tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi, tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan tingkat kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.

Kondisi sektor keuangan tanah air relatif cukup solid hingga triwulan III tahun 2024, meskipun kita perlu mewaspadai tren perlambatan yang sedang terjadi dalam aktivitas keuangan. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat mencapai 6,7 persen (yoy) pada September 2024, tetapi DPK berada dalam tren perlambatan sejak Juni 2024. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan jenis rekening giro dan simpanan berjangka serta kecenderungan individu untuk beralih ke instrumen investasi lain. Sementara itu, pertumbuhan kredit tercatat masih tinggi dengan capaian 10,4 persen (yoy)

pada September 2024 yang ditopang oleh pertumbuhan kredit korporasi. Sektor perbankan juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dengan tingkat profitabilitas dan permodalan yang baik serta risiko kredit yang tetap terjaga dengan baik. Meskipun dalam tren perlambatan, terlihat bahwa kinerja sektor keuangan Indonesia dalam posisi cukup baik sehingga menjadi modal baik bagi Indonesia untuk melanjutkan pendalaman sektor keuangan.

Kebijakan moneter serta makroprudensial yang dilakukan Bank Indonesia (BI) telah memainkan peran penting guna memberikan dukungan bagi pendalaman sektor keuangan. Kebijakan moneter, seperti tingkat BI Rate, terus disesuaikan mengikuti perkembangan ekonomi terkini. Keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga di tingkat 6,0 persen pada Oktober 2024 menegaskan bahwa kebijakan moneter diarahkan guna memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran serta memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu, BI juga terus melanjutkan kebijakan makroprudensial guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk dalam upaya mendorong digitalisasi pada sektor keuangan. Kedua kebijakan tersebut dapat memperkuat stabilitas maupun inklusi keuangan serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendalaman sektor keuangan.

Dampak positif dari pendalaman sektor keuangan berpotensi untuk mendorong peningkatan investasi asing langsung (FDI). Sistem keuangan yang baik akan membuat investor lebih mudah dalam melakukan pengelolaan investasi mereka sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi lebih banyak, terutama bagi negara berkembang (Dua & Verma, 2024). Singapura merupakan contoh negara di ASEAN dengan sektor keuangan yang dalam. Hal ini ditunjukkan antara lain dari tingkat kapitalisasi pasar yang mencapai 124,3 persen dari PDB (Indonesia: 46,3 persen) serta penyaluran kredit kepada pihak swasta sebesar 129,1 persen dari PDB (Indonesia: 42,2 persen) (World Bank, 2024). Kedalaman sektor keuangan ini mampu menarik FDI dalam jumlah besar bagi Singapura, dimana World Bank mencatat FDI *inflows* Singapura mencapai USD175 juta pada 2023 (Indonesia: USD22 juta).

Kerja sama regional tentunya akan memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor keuangan di Indonesia. ASEAN telah mengeluarkan beberapa inisiatif untuk memperkuat integrasi keuangan antar negaranya. Contohnya yakni ASEAN Banking Intergration Framework (ABIF) yang memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas kemudahan akses serta fleksibilitas dalam kegiatan operasional bagi bank-bank di Kawasan ASEAN. Selain itu,

ASEAN juga telah melakukan upaya dalam meningkatkan koordinasi kebijakan antara negara serta mengembangkan pasar modal regional. Inisiatif ini merupakan peluang bagi Indonesia dalam memperkuat kerjasamanya dengan negara ASEAN lain, terutama dalam meningkatkan daya saing sektor keuangan agar dapat menarik lebih banyak investasi asing. Integrasi keuangan yang lebih kuat juga dapat membantu Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta menghadapi risiko global di masa mendatang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk melakukan pendalaman sektor keuangan. Pertama, hambatan regulasi sering kali menyebabkan inovasi serta fleksibilitas pada sektor ini sulit berkembang. Kedua, infrastruktur keuangan yang relatif belum merata, terutama di wilayah Indonesia Timur. Terakhir, rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang optimal terhadap layanan keuangan. Ketiga isu tersebut perlu diatasi dengan pendekatan secara menyeluruh. Pembangunan infrastruktur keuangan serta edukasi keuangan yang luas dapat membantu pendalaman sektor keuangan agar dapat berjalan efektif. Selain itu, reformasi regulasi juga perlu dilakukan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia.

Teknologi finansial (*fintech*) memiliki peran vital dalam mendorong sektor keuangan yang dalam di Indonesia. Berbagai inovasi digital yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, seperti pinjaman *online*, pembayaran elektronik, serta aplikasi berbasis layanan keuangan berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya cukup sulit dijangkau. BI mencatat transaksi *digital banking* mencapai 5,6 miliar transaksi atau tumbuh sebesar 34,43 persen (yoy) per September 2024, sementara transaksi uang elektronik mencapai 4,0 miliar transaksi atau tumbuh 29,11 persen (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa *fintech* mampu meningkatkan inklusi keuangan, terutama di wilayah terpencil. Pemanfaatan teknologi ini dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah sehingga mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperdalam sektor keuangannya. Pertama, perlunya peningkatan kerja sama antara pihak pemerintah dan swasta dalam hal reformasi regulasi dengan tujuan menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Beberapa langkah konkret yang dapat pemerintah lakukan antara lain memperluas akses kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mempercepat digitalisasi

layanan keuangan, serta meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap sektor keuangan. Kedua, pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan guna mendukung inovasi dalam *fintech*. Tentunya penguatan infrastruktur keuangan harus dilakukan terlebih dahulu, terutama pada wilayah terpencil serta Indonesia Timur yang relatif cukup minim dari segi konektivitas. Kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong sektor keuangan Indonesia menjadi lebih efisien dan inklusif.

Sektor keuangan memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian Indonesia. Meski kebijakan moneter dan makroprudensial terus diperkuat, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam sektor keuangan. Dalam hal ini, sangat penting untuk terus meningkatkan pendalaman sektor keuangan di Indonesia karena dapat mendukung inklusi keuangan serta menarik investasi asing sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di wilayah ASEAN. Tidak hanya reformasi regulasi, diperlukan dorongan dan inovasi pada *fintech* serta peningkatan infrastruktur keuangan guna memperkuat sektor keuangan Indonesia. Langkah konkret ini diperlukan agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperkuat perekonomian Indonesia dalam tatanan regional.





Aksesi Timor Leste ke ASEAN dan Potensi Manfaatnya bagi Indonesia

Cahaya Agus Ismir⁹

Aksesi Timor Leste ke ASEAN dan Potensi Manfaatnya bagi Indonesia

Republik Demokratik Timor Leste, atau sering disingkat Timor Leste baru meraih kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002 yang ditandai dengan berlakunya Konstitusi Republik Demokratis Timor Leste dan selanjutnya Timor Leste diakui sebagai negara merdeka dan berdaulat oleh PBB sehingga Timor Leste merupakan salah satu negara termuda di dunia. Timor Leste menganut sistem republik semi-presidensial dengan presiden pertamanya adalah Presiden Xanana Gusmão. Timor Leste memiliki sejarah panjang kedekatan dengan Indonesia karena pernah menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia

dari tahun 1976 sampai dengan 1999.

Timor Leste mengajukan permohonan diri untuk menjadi negara anggota ASEAN yang ke-11 sejak tahun 2011. Hal ini dilakukan oleh Timor Leste karena secara geografis Timor Leste berada di kawasan Asia Tenggara. Keinginan Timor Leste untuk masuk ke ASEAN baru terwujud pada KTT ASEAN ke 41 bulan November 2022 di Kamboja. Negara-negara ASEAN menilai bahwa Timor Leste sudah cukup layak untuk bergabung di ASEAN. Penetapan Timor Leste sebagai anggota ASEAN menjadi salah satu poin dalam Pernyataan Para Pemimpin ASEAN di KTT 2022 di Kamboja. Berdasarkan pernyataan KTT tersebut maka

negara-negara ASEAN resmi mengakui empat poin terkait bergabungnya Timor Leste, yaitu: (1) mengakui Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN; (2) memberikan status pengamat kepada Timor Leste dan memperbolehkan partisipasi Timor Leste dalam seluruh pertemuan ASEAN termasuk pada sidang pleno KTT; (3) meresmikan peta panduan (*roadmap*) yang obyektif untuk Timor Leste sesuai dengan tonggak sejarah agar bisa diadopsi di KTT ASEAN berikutnya; dan (4) mengajak semua negara anggota ASEAN untuk memberi dukungan dan bantuan yang relevan kepada Timor Leste mencapai tonggak sejarah tersebut sesuai kapasitasnya. Terkait dengan bergabungnya Timor

⁹Analisis Kebijakan Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

Leste menjadi negara anggota ASEAN, maka secara resmi ASEAN memiliki anggota sebanyak 11 negara.

Keinginan Timor Leste untuk bergabung ke ASEAN selalu mendapatkan dukungan dari Indonesia secara konsisten. Hal ini dilakukan dengan membantu Timor Leste untuk memenuhi beberapa kriteria yang diajukan ASEAN. Indonesia memberikan beberapa program bantuan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Timor Leste untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan ASEAN. Meskipun sudah dinilai layak dan tepat untuk menjadi negara anggota ASEAN akan tetapi Timor Leste masih menghadapi berbagai tantangan dalam negeri yang cukup besar, seperti tantangan demografis dan ekonomi. Berdasarkan data *United Nations Population Fund* pada tahun 2024 populasi Timor Leste berada pada angka 1,4 juta jiwa dengan memiliki profil penduduk di bawah usia 15 tahun sebesar 39 persen. Potensi demografi ini dalam jangka panjang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi di sisi lain Timor-Leste juga menghadapi risiko pengangguran tinggi dan tingkat kemiskinan yang cukup besar terutama di daerah pedesaan serta beban demografi dalam jangka pendek.

Ekonomi Timor-Leste saat ini masih sangat bergantung pada minyak dan gas di selat

Timor, yang menyumbang sekitar 75 persen pendapatan pemerintah di tahun 2023 dan sekitar 80 persen dari Produk Domestik Bruto (www.timorleste.tl). Ketergantungan terhadap minyak dan gas ini membuat perekonomian Timor Leste sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global, yang pada gilirannya dapat meningkatkan volatilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Meski memiliki kekayaan minyak yang melimpah, data *Timor-Leste Economic Report* Desember 2022 dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Timor-Leste masih menjadi salah satu negara termiskin di Asia, dengan tingkat kemiskinan sekitar 41,8 persen pada tahun 2022. Pengangguran juga masih menjadi masalah yang cukup serius dengan 2,9 persen dari angkatan kerjanya menganggur.

Pertanian, yang mempekerjakan sekitar 39 persen dari *total employment*, hanya menyumbang sekitar 10 persen terhadap PDB, mencerminkan rendahnya produktivitas sektor ini (www.data.worldbank.org). Praktik pertanian tradisional, akses pasar yang terbatas, serta kerentanan terhadap perubahan iklim disinyalir menjadi tantangan utama yang dihadapi sektor ini selain dari kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas penyimpanan.

Oleh karena itu, keanggotaan dalam ASEAN akan membuka peluang besar bagi Timor-Leste untuk memperkuat

integrasi ekonominya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Timor-Leste kelak akan dapat memanfaatkan pasar tunggal ASEAN yang memungkinkan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja yang lebih bebas di antara negara-negara anggota. Dengan demikian, ekspor diharapkan dapat meningkat sekaligus dapat menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment*) sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Timor-Leste ke depannya.

Selain itu, integrasi dengan ASEAN juga dapat mendukung upaya Timor-Leste untuk dapat mendiversifikasi ekonominya. Dengan menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan standar ASEAN, Timor-Leste dapat mengakses perjanjian perdagangan regional, berpartisipasi dalam rantai pasokan regional, dan mendapatkan bantuan teknis untuk pengembangan sektoral, seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Keanggotaan ASEAN juga dapat membuka akses ke berbagai inisiatif pembangunan dan program bantuan yang dapat membantu negara ini dalam meningkatkan infrastruktur dan kapasitas institusionalnya.

Dari sisi keamanan dan stabilitas, keanggotaan Timor-Leste di ASEAN diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam dialog keamanan dan pertahanan regional. Dengan lokasi

strategisnya, Timor-Leste akan turut berkontribusi dalam memperkuat kerangka keamanan regional ASEAN, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan secara keseluruhan.

Bagi Indonesia, dukungan terhadap akses Timor-Leste ke ASEAN tidak hanya akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN, tetapi juga semakin meningkatkan pengaruh di panggung internasional. Keanggotaan Timor-Leste diharapkan akan memperkuat koordinasi regional bagi kepentingan strategis Indonesia. Di sisi ekonomi, bergabungnya Timor-Leste ke ASEAN membuka peluang pasar baru bagi produk-produk Indonesia dan memungkinkan keterlibatan perusahaan Indonesia dalam proyek infrastruktur di Timor-Leste, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan telekomunikasi. Potensi lainnya adalah Timor Leste dengan kapasitas lahan padi seluas 38.000 hektar, serta jagung dengan luas lahan sebesar 120.000 hektar berpotensi sebagai alternatif bagi Indonesia saat membutuhkan pasokan beras dan jagung. Letak geografis Timor Leste yang berada di bagian timur Indonesia berpotensi menggerakkan perekonomian Indonesia bagian Timur. Hal lainnya adalah pada masa yang akan datang saat Timor Leste sudah melakukan implementasi secara penuh komitmen di *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA) yang

terdiri dari tiga perjanjian, yaitu: Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN (ATIGA), Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Jasa (AFAS) yang saat ini sudah di tingkatkan menjadi Perjanjian Perdagangan Jasa ASEAN (ATISA), dan Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA), maka ini akan menjadi keuntungan bagi Indonesia karena negara tersebut berbatasan langsung dengan Indonesia. Potensi ini dapat terjadi karena saat sudah implementasi secara penuh maka tarif bea masuk barang dari ASEAN akan diturunkan atau bahkan dihapus sehingga barang dari ASEAN lebih kompetitif terutama produk dari Indonesia berupa produk otomotif, sereal dan peralatan mesin.

Namun, jalan untuk menuju implementasi pada AFTA masih panjang. Saat ini Timor Leste sudah bisa hadir pada pertemuan pilar ekonomi sebagai pengamat dengan mendapatkan akses ke pertemuan dan dokumen pertemuan tersebut. Serta Timor Leste secara bertahap sesuai dengan *rules of procedures* (ROP) akan memenuhi proses legal domestiknya dengan meratifikasi berbagai dokumen dan instrumen ASEAN ke dalam sistem hukum nasionalnya. Selain itu, Timor-Leste harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam *roadmap* Timor Leste untuk akses ke ASEAN yang telah disetujui bersama.

Untuk memenuhi standar

ASEAN, Timor-Leste harus memodernisasi Bandara Nicolau Lobato dan mengembangkan infrastruktur telekomunikasi yang terhubung dengan jaringan kabel bawah laut internasional sehingga secara infrastruktur lebih mudah untuk terhubung dengan negara ASEAN lainnya. Hal lainnya adalah Timor-Leste harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, baik sipil maupun militer. Pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia ini penting dilakukan agar Timor Leste siap untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan berbagai pertemuan ASEAN yang juga menjadi bagian dari komitmen Timor-Leste sebagai anggota penuh.

Untuk itu, proses akses Timor-Leste membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. ASEAN sendiri sebenarnya telah menyediakan bantuan dalam bentuk *capacity building*. Demikian pula dengan Indonesia yang juga telah memberikan bantuan *capacity building* dalam bentuk magang, pelatihan, maupun beasiswa dalam beberapa tahun terakhir ini. Diharapkan, bantuan-bantuan tersebut dapat terus berlanjut dan bahkan diperluas dan ditingkatkan lagi dalam bentuk kerjasama pembangunan infrastruktur dasar. Ke depan, keanggotaan penuh Timor-Leste akan semakin mendorong peningkatan kemakmuran dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang lebih tinggi lagi.



Penguatan Posisi Indonesia dalam *Global Value Chain*

Imran Rosjadi¹⁰

Indonesia perlu mengantisipasi langkah ke depan di sektor perdagangan dengan beberapa fenomena baru dalam kerja sama perdagangan dan sistem pembayaran internasional. Pada era multipolaritas dunia, Indonesia berhadapan dengan kelompok mitra OECD di satu sisi, dan Indonesia berpeluang menjadi mitra BRICS di sisi lain. Daya tawar perdagangan Indonesia menjadi penting dihadapan kelompok OECD maupun BRICS.

OECD memiliki posisi penting pada *Global Value Chain* (GVC) terutama dalam mengembangkan alat analisis dan menyediakan data yang komprehensif terkait perdagangan global dan peran negara-negara dalam GVC seperti inisiatif membuat OECD *Trade in Value Added* (TiVA) Database. Melalui data TiVA, OECD membantu negara-negara memahami bagaimana produk dan jasa global diproduksi, mulai dari input awal hingga produk akhir, dan menganalisis kontribusi

negara-negara di setiap tahap proses produksi.

Sementara itu, negara-negara BRICs, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok dan Afrika Selatan menempati posisi penting dalam rantai nilai global karena merupakan kontributor utama dalam produksi dan pasokan, pusat pasar konsumen yang tumbuh pesat, bukan hanya penyedia bahan mentah tetapi juga produksi bernilai tambah tinggi. Negara-negara ini berupaya memperkuat

¹⁰Analisis Kebijakan Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

integrasi ekonomi dan kerja sama regional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional Eropa dan USA.

Posisi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) dalam GVC bertindak sebagai katalisator integrasi ekonomi global dengan mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat usaha kecil dan menengah, memungkinkan pembiayaan berkelanjutan, dan memperkuat kemampuan negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global. Peran ini tidak hanya akan mempercepat integrasi negara-negara berkembang ke dalam perekonomian global, namun juga membantu membangun rantai pasokan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat daya tawar perdagangan Indonesia, memerlukan penjabaran dari berbagai sumber dan kegiatan mengamati internasional terhadap potensi perdagangan antara lain menganalisis sumber data Multilateral Development Banks (MDBs) yang dapat sebagai rujukan Indonesia.

Wang, Z., Wei, S., Yu, dan Zhu dalam bukunya yang berjudul *"Characterizing Global Value Chains: Production Length and Upstreamness"*, memperkenalkan konsep *production length* untuk menggambarkan lamanya proses produksi suatu produk dalam rantai nilai global, dan konsep *upstreamness*

untuk menentukan posisi relatif suatu sektor dalam rantai produksi global. Karya ini berkontribusi pada analisis kompleksitas dan keterlibatan berbagai negara dan sektor dalam jaringan produksi internasional yang terfragmentasi.

Rantai nilai *average production length of GVCs* (PLv_GVC) berdasarkan *forward linkages* merupakan rata-rata jumlah tahap yang dilalui oleh output dari suatu sektor hingga mencapai konsumen akhir melalui rantai nilai global. Konsep ini mengukur kompleksitas dan panjang rantai produksi global dengan mempertimbangkan peran sektor tersebut dalam menyediakan input yang kemudian diproses lebih lanjut di negara lain. Sektor dengan *forward linkages* panjang cenderung menjadi pemasok bahan baku atau komponen yang akan terus diolah di berbagai tahap produksi internasional sebelum mencapai pasar akhir.

Komponen ini penting untuk memahami sejauh mana Indonesia berperan dalam rantai nilai global sebagai penghasil nilai baru dibandingkan dengan hanya menjadi pengolah bahan mentah atau komponen. Lebih jauh menyoroti kontribusi Indonesia dalam menciptakan nilai tambah dalam proses produksi global. Ini mengukur seberapa besar bagian dari ekspor yang menyumbang nilai tambah domestik dan menggambarkan peran

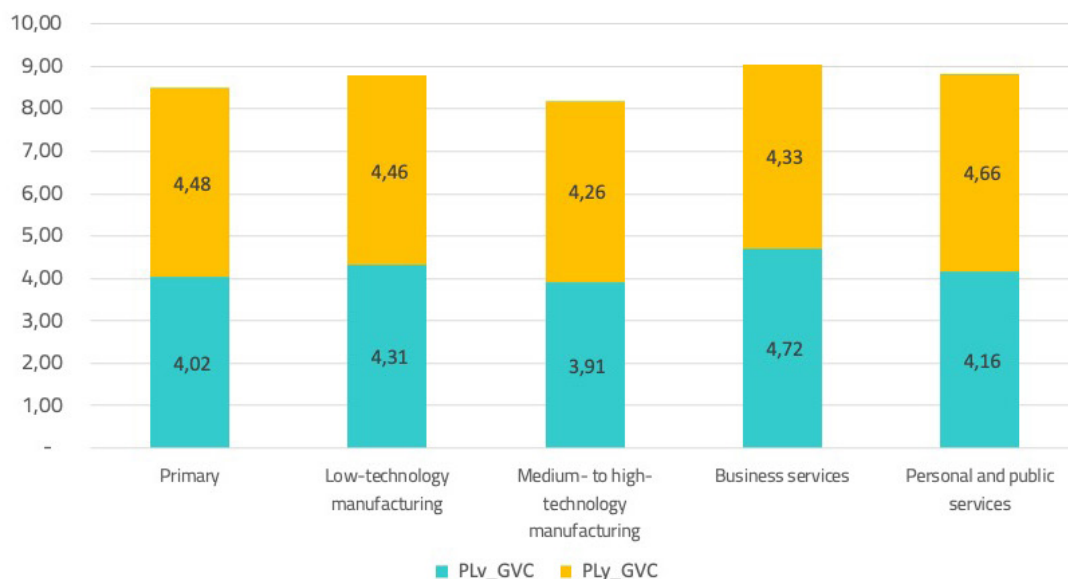
Indonesia dalam menghasilkan *output* bernilai tinggi.

Rantai nilai *average production length of GVCs* (PLy_GVC) berdasarkan *backward linkages* mengukur jumlah rata-rata tahap produksi yang dilalui oleh masukan barang/jasa yang diimpor hingga menjadi produk akhir yang diproduksi domestik. Indikator ini menggambarkan seberapa banyak tahapan produksi yang melibatkan input dari luar negeri sebelum produk jadi siap untuk dikonsumsi atau diekspor. Semakin panjang *backward linkages*, semakin besar keterlibatan sektor atau negara dalam rantai nilai global yang bergantung pada bahan baku atau komponen dari berbagai sumber internasional. Ini mencerminkan tingkat kompleksitas dan ketergantungan pada input global.

Gambaran tersebut di atas membantu mengidentifikasi bagaimana Indonesia terlibat dalam perdagangan internasional, baik sebagai pemasok barang/jasa yang bernilai tinggi maupun sebagai konsumen input dari rantai nilai global, serta implikasinya bagi ekonomi lokal dan daya saing di pasar global. MDBs menggunakan kerangka ini untuk memahami peran negara-negara Asia dalam jaringan produksi global yang semakin terfragmentasi dan terintegrasi antarnegara.

Forward linkages industri primer Indonesia sebesar 4,02 menunjukkan bahwa

Grafik 1.GVC Indonesia di 5 Sektor Unggulan 2020-2021



Sumber: Kemenkeu

nilai tambah dalam negeri dari industri utama ini berkontribusi signifikan terhadap rantai nilai global. Artinya, industri primer Indonesia, seperti pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya, berperan penting dalam menciptakan nilai baru yang diserap ke dalam perekonomian global.

Pada saat yang sama, *backward linkages* sebesar 4,48 menunjukkan bahwa sektor tersebut juga bergantung pada input dari sektor lain untuk mendukung outputnya. Artinya, meskipun industri primer menghasilkan nilai tambah, industri tersebut akan menggunakan masukan asing untuk meningkatkan produktivitasnya dalam perdagangan global.

Sektor manufaktur berteknologi rendah, yang meliputi tekstil, pakaian, dan produk-produk sederhana

lainnya, menunjukkan kontribusi nilai tambah domestik yang potensial terhadap perdagangan global, sebagaimana dibuktikan oleh *backward linkages* sebesar 4,31. Hal ini menandakan bahwa sektor ini menghasilkan nilai baru yang substansial di seluruh proses produksinya, sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sementara itu, nilai *backward linkages* sebesar 4,46 menandakan ketergantungan sektor ini pada input eksternal, yang mencakup sumber domestik dan internasional, untuk produksi barang akhirnya. Hal ini menggarisbawahi keterlibatan sektor manufaktur berteknologi rendah di Indonesia dalam rantai pasokan global, di mana impor bahan baku atau komponen sangat penting untuk proses manufakturnya.

Nilai *forward linkages* untuk sektor manufaktur berteknologi menengah hingga tinggi di Indonesia sebesar 3,91 menunjukkan bahwa kontribusi nilai tambah domestik yang signifikan, meskipun sedikit lebih rendah daripada sektor berteknologi rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor ini terus menjadi signifikan dalam menghasilkan nilai yang diserap oleh pasar global, dampaknya masih agak terbatas.

Nilai *backward linkages* sebesar 4,26 menunjukkan ketergantungan yang signifikan pada input eksternal, yang menyoroti ketergantungan sektor ini pada bahan baku atau komponen teknologi impor untuk meningkatkan produksi dan memperkuat daya saing global.

Sektor manufaktur teknologi menengah hingga tinggi Indonesia cukup terintegrasi ke dalam rantai nilai global, dengan tingkat ketergantungan yang lebih tinggi pada impor bahan teknologi. Ketergantungan ini mencerminkan pentingnya komponen dan teknologi asing dalam mendukung kemampuan sektor tersebut untuk memproduksi barang yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Dengan *forward linkage* yang lebih rendah dibandingkan *backward linkage*, sektor ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusi nilai tambah domestiknya, meskipun memiliki potensi besar untuk memperkuat keterlibatan Indonesia dalam jaringan manufaktur global.

Nilai *forward linkages* sebesar 4,72 untuk sektor

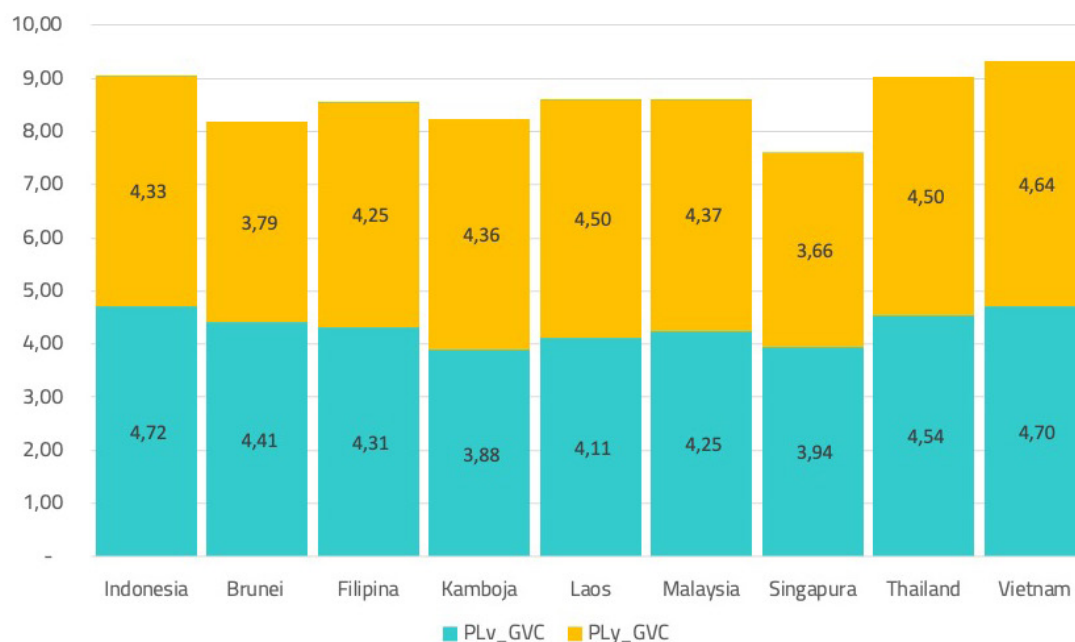
layanan bisnis di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi nilai tambah domestik yang sangat potensial dalam rantai nilai global. Ini berarti layanan bisnis seperti konsultasi, teknologi informasi, dan jasa keuangan memainkan peran penting dalam menciptakan nilai baru yang digunakan secara global.

Sedangkan *backward linkages* sebesar 4,26 mengindikasikan bahwa sektor ini juga memiliki ketergantungan yang signifikan pada input dari sektor lain, termasuk input domestik dan impor, untuk mendukung layanan yang diekspor. Ini mencerminkan peran sektor ini dalam menghubungkan dan memperkuat integrasi dengan aktivitas ekonomi lain di rantai nilai global

Nilai *forward linkages* untuk sektor layanan personal dan publik di Indonesia sebesar 4,16 menunjukkan bahwa kontribusi nilai tambah domestik dari sektor ini cukup signifikan dalam konteks rantai nilai global. Artinya, sektor ini berkontribusi dalam menciptakan nilai baru yang digunakan oleh berbagai industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di sisi lain, *backward linkages* GVC sebesar 4,66 mengindikasikan bahwa sektor layanan personal dan publik memerlukan input dari sektor lain, baik domestik maupun internasional. Sinergi ini menunjukkan pentingnya keterkaitan sektor ini dengan sektor lain dalam mendukung produksi layanan yang berorientasi pada pasar global. Sektor personal dan layanan publik, mencakup

Grafik 1.GVC Indonesia di 5 Sektor Unggulan 2020-2021



Sumber: Kemenkeu

industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dan juga industri yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), limbah dan lingkungan.

Berdasarkan fakta di atas sektor layanan bisnis Indonesia memiliki keunggulan dan mampu bersaing di GVC karena menempati nilai yang tertinggi baik *forward linkages* (4,72) maupun *backward linkages* (4,26) diantara 5 sektor perdagangan lainnya. mencerminkan pentingnya sektor ini dalam menambahkan nilai baru yang sangat signifikan ke dalam ekonomi global, sambil tetap memanfaatkan input dari sektor lain. Hal ini menunjukkan bahwa layanan bisnis Indonesia, seperti IT, keuangan, dan manajemen, tidak hanya menyediakan layanan bernilai tinggi tetapi juga bergantung pada konektivitas dengan sektor domestik dan internasional untuk beroperasi secara efektif. Integrasi ini memperlihatkan peran penting layanan bisnis dalam memperkuat daya saing global.

Sektor *business services* Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan mitra dagang Indonesia di ASEAN dan mampu bersaing dalam perdagangan internasional karena menempati nilai *forward linkages* cukup tinggi sebesar (4,72) dan *backward linkages* (4,26) diikuti dengan

Vietnam dengan *forward linkages* dan *backward linkages* masing-masing sebesar (4,70) dan (4,64), Thailand (4,54) dan (4,50), Brunei (4,41) (3,79) dan Filipina (4,31-4,25).

Kesimpulan:

- Berdasarkan hasil analisis data dan informasi tersebut di atas, Indonesia lebih unggul di sektor *business services* dibanding beberapa negara ASEAN dengan nilai *forward linkages* dan *backward linkages* masing-masing sebesar (4,72) dan (4,26) keunggulan sektor ini memberikan kontribusi nilai tambah domestik yang sangat potensial dalam rantai nilai global. Adapun industri yang potensial untuk dikembangkan, yaitu konsultasi, teknologi informasi, dan jasa keuangan. Ini berarti bahwa layanan bisnis memainkan peran penting dalam menciptakan nilai baru yang digunakan secara global. Untuk keunggulan sektor *personal & public services*, industri yang potensial untuk dikembangkan mencakup industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dan juga industri yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), limbah dan lingkungan.

- Rekomendasi kebijakan, yang telah ada disektor *business services* yaitu *e-government* dan *fintech*, digitalisasi layanan *Online Single Submission / OSS* dan kemitraan internasional berupa *Free Trade Agreement*. Rekomendasi kebijakan kedepan, yaitu melanjutkan transformasi digital, penguatan pendidikan dan pelatihan dengan meningkatkan kompetensi SDM disektor jasa dan konektivitas regional melalui rantai nilai ASEAN melalui *Regional Comprehensive Economic Partnership/ RCEP* dan global serta mendukung bisnis yang ramah lingkungan.



Perkembangan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan dan Jaringan Pengaman Keuangan di Kawasan ASEAN+3

Yudha Perdana¹¹

Latar Belakang

Penggunaan mata uang dalam transaksi internasional bukan merupakan isu baru akibat persaingan geopolitik global, meskipun isu tersebut menjadi semakin terangkat dengan kompetisi yang semakin memanas belakangan ini. Beberapa negara di kawasan ASEAN+3 telah mencatat penggunaan mata uang selain dolar Amerika Serikat (USD) dalam perdagangan internasionalnya seperti Republik Korea (Korea Selatan), Thailand, dan termasuk Indonesia. Tulisan

ini bertujuan untuk melihat perkembangan penggunaan mata uang lokal kawasan di ASEAN+3 dalam ekspor dan impor baik secara global maupun di kawasan. Sampel yang digunakan dalam observasi ini adalah Republik Korea, Thailand, dan Indonesia karena pertimbangan ketersediaan data. Selanjutnya, dalam tulisan ini akan dibahas sekilas mengenai inisiatif jaring pengaman keuangan kawasan yang juga telah berkembang dengan penggunaan mata uang lokal. Mengingat isu dedolarisasi maupun persaingan di bidang

lain sebagai dampak dari persaingan geopolitik global, posisi dalam mengambil keputusan perlu diambil secara hati-hati sesuai data. Penurunan penggunaan mata uang USD dalam perdagangan tidak terjadi dalam semalam sehingga cara menyikapinya harus secara proporsional.

Potret Penggunaan Mata Uang Lokal Perdagangan Global oleh Republik Korea dan Thailand

Data penggunaan mata uang lokal pada Republik Korea dan Thailand telah tersedia sejak

¹¹Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

tahun 1990-an. Pada tahun 1993, Thailand menggunakan USD sebagai mata uang transaksi sebanyak 74,3% atas impornya dari seluruh dunia, yang merupakan nilai terendah yang tersedia hingga tahun 2023. Begitu pula dengan Republik Korea, impornya pada tahun 1992, senilai 22,1% nilai impornya telah menggunakan mata uang selain USD.

Pada Republik Korea, ekspor yang pembayarannya menggunakan USD secara umum menunjukkan tren menurun dari 89% pada tahun 1992 menjadi 83,1% di tahun 2023 dengan mitra dagang seluruh negara di dunia. Pada sisi impor global, penggunaan USD sebaliknya menunjukkan tren meningkat dari 77,9% di tahun 1992 menjadi 80,6% tahun 2023 dengan titik terendah pada 77,2% di tahun 1994 dan

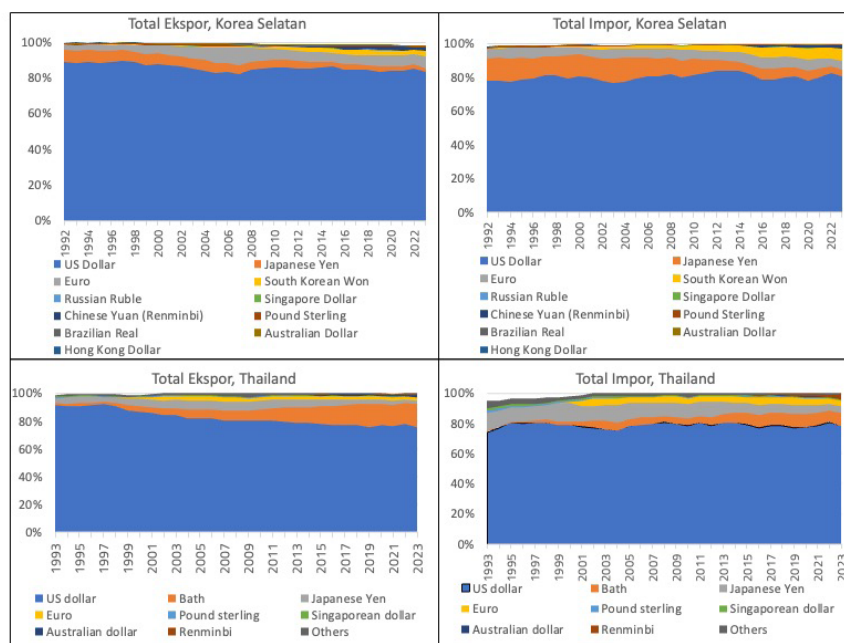
2004. Impor Korea Selatan menggunakan USD mengalami titik tertinggi pada tahun 2014 dengan angka sebesar 84,3%. Mata uang tertinggi kedua yang digunakan untuk pembayaran transaksi ekspor dan impor adalah yen Jepang (JPY), yang penggunaannya secara rata-rata mencapai 4,6% untuk ekspor dan 9,7% untuk impor, namun nilai tersebut mengalami tren penurunan 10 tahun terakhir. Pada ekspor Korea Selatan, mata uang non-USD yang penggunaannya mengalami tren peningkatan adalah euro (EUR), won Korea (KRW), yuan Republik Rakyat Tiongkok/ RRT (CNY), dan dolar Australia (AUD). Sementara pada sisi impor, mata uang yang penggunaannya meningkat adalah EUR, KRW, dan CNY. Pembayaran menggunakan mata uang utama lain seperti

sterling Inggris Raya (GBP), dolar Singapura (SGD), rubel Rusia (RUB), dan real Brasil (BRL) stabil pada sisi ekspor dan impor.

Pada Thailand, penggunaan USD pada transaksi ekspor dan impor dengan mitra dagang seluruh negara di dunia, menunjukkan tren menurun hingga tahun 2023. Nilai rata-rata penggunaan USD tahun 1993–2023 untuk ekspor dan impor masing-masing adalah 82,4% dan 78,8%, kemudian nilainya pada tahun 2023 untuk keduanya adalah 75,8% dan 78,5%. Di bawah USD, mata uang kedua terbesar yang digunakan baik untuk ekspor dan impor secara global adalah bath Thailand (THB). Penggunaan THB menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2023, yang pada sisi ekspor mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 yang mencapai 16,2%. Untuk impor, nilai penggunaan THB pada tahun 2023 adalah 8,4%, dan puncak penggunaannya terjadi pada tahun 2019, yang mencapai 9%. Kebetulan, pada tahun 2019 Thailand memegang tongkat estafet keketuaan ASEAN, termasuk untuk kerja sama sektor keuangan. Untuk mata uang lainnya, tren menurun terjadi pada sisi ekspor dan impor untuk JPY, GBP, dan SGD, sebaliknya, tren meningkat terjadi untuk EUR, AUD, dan CNY.

Secara global, baik di Republik Korea dan Thailand, dapat dikatakan bahwa penggunaan USD di ekspor dan impor terdapat indikasi menurun,

Grafik 1. Perkembangan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Ekspor dan Impor Republik Korea dan Thailand secara Global



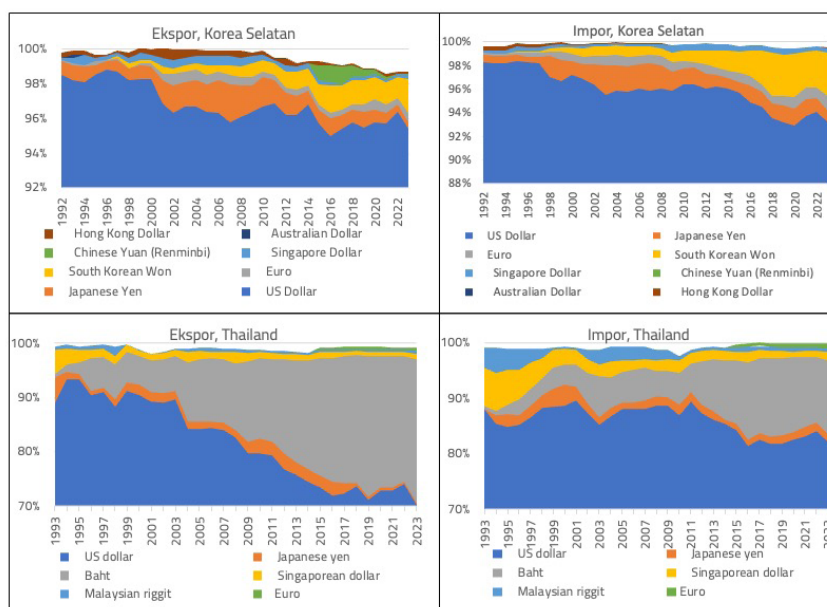
Catatan: Diolah dari statistik publikasi bank sentral, Bank of Korea dan Bank of Thailand, data tahunan hingga tahun 2023.

yang substitusinya lebih kepada mata uang lokal masing-masing, dan CNY. Sementara, penggunaan mata uang lokal lain di kawasan ASEAN+3 yaitu JPY dan SGD di keduanya mengalami tren cenderung ke arah menurun. Penggunaan mata uang lain yang berada dalam keranjang *special drawing rights* (SDRs) Dana Moneter Internasional menunjukkan tren meningkat untuk EUR dan menurun untuk GBP, yang bukan merupakan mata uang dalam lingkup kerja sama keuangan ASEAN+3. Pada saat diskusi mempromosikan penggunaan mata uang lokal, akan terdapat perbedaan pandangan dari sisi RRT dan Jepang mempertimbangkan penggunaan mata uang mereka dalam perdagangan bergerak ke arah yang berlawanan. RRT akan lebih positif dalam diskusi terkait ini, sementara Jepang berada di posisi yang kurang menguntungkan daripada RRT dan negara anggota lainnya, dalam kasus ini, Republik Korea dan Thailand. Sementara itu, Singapura sebagai *hub* perdagangan utama di ASEAN posisinya relatif tidak berada di sisi yang tren mata uangnya mengalami kenaikan.

Potret Penggunaan Mata Uang Lokal Perdagangan dengan ASEAN oleh Republik Korea dan Thailand

Aktivitas ekspor dan impor Korea Selatan dengan negara-negara ASEAN masih

Grafik 2. Perkembangan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Ekspor dan Impor Republik Korea dan Thailand dengan Mitra Kawasan ASEAN



Catatan: Diolah dari statistik publikasi bank sentral, Bank of Korea dan Bank of Thailand, data tahunan hingga tahun 2023.

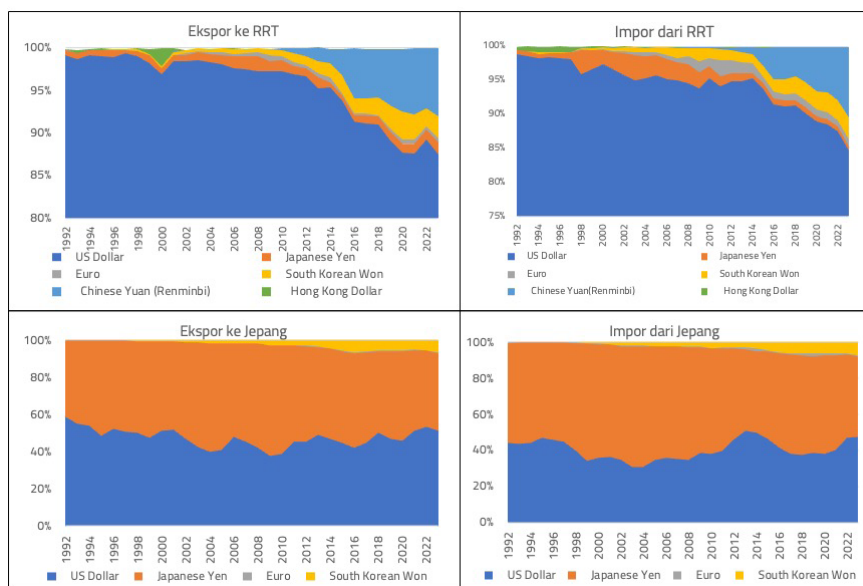
didominasi oleh USD dengan nilai di atas 90% untuk kedua sisi, dengan menunjukkan tren menurun, khususnya untuk impor yang turun ke 93,2% pada tahun 2023. Pada sisi ekspor, penggunaannya pernah mencapai 95% pada tahun 2016, lebih rendah daripada angka tahun 2023 yang sebesar 95,4%. Tren menurun atas penggunaan USD, serupa terjadi pada Thailand untuk ekspor dan impor. Untuk ekspor, penggunaan USD turun dari 89% di tahun 1993 menjadi 70,1% di tahun 2023, dan untuk impor, penggunaannya turun dari 88,1% menjadi 82,1% selama tahun observasi yang sama. Penggunaan SGD baik pada Republik Korea maupun Thailand pada sisi ekspor dan impor menunjukkan tren menurun sehingga

dapat mempengaruhi posisi Singapura dalam pembahasan penggunaan mata uang lokal. Begitu juga pada penggunaan ringgit Malaysia (MYR) pada ekspor dan impor Thailand di kawasan. Terdapat juga penggunaan beberapa mata uang di luar kawasan ASEAN dalam perdagangan kedua negara dengan ASEAN tetapi masih dalam lingkup ASEAN+3, antara lain seperti JPY dan CNY untuk keduanya, dan HKD oleh Republik Korea.

Fenomena Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan oleh Republik Korea dengan RRT dan Jepang

Potret dari sisi Republik Korea digunakan mengingat posisinya sebagai negara mitra di sisi RRT, Jepang,

Grafik 3. Perkembangan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Ekspor dan Impor Republik Korea dengan RRT dan Jepang



Catatan: Diolah dari statistik publikasi bank sentral, Bank of Korea dan Bank of Thailand, data tahunan hingga tahun 2023.

dan Republik Korea (Plus-3) yang ukuran ekonominya paling kecil, dan faktor ketersediaan data. Untuk ekspor dan impor dengan RRT, terlihat tren menurun dalam penggunaan USD, dari yang hampir mencapai 100% menjadi 87,5% untuk ekspor 2023, dan 84,6% untuk impor 2023. Penggunaan mata uang CNY dan KRW untuk transaksi ekspor dan impor meningkat, khususnya secara signifikan atas CNY. Terdapat fenomena terjadi menaik untuk penggunaan JPY pada transaksi ekspor dengan RRT, namun di sisi impor terjadi tren menurun. Sementara untuk transaksi dengan Jepang, penggunaan USD justru terjadi peningkatan baik di sisi ekspor maupun impor, dan hal yang sama terjadi dengan penggunaan KRW. Namun, penggunaan

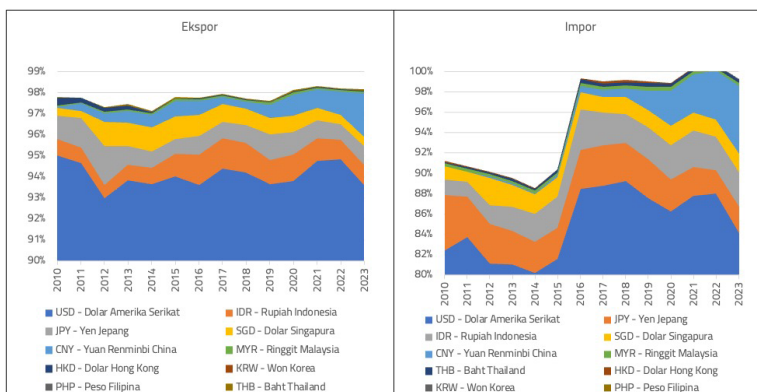
JPY justru mengalami penurunan sebagai mata uang transaksi. Meskipun Jepang, khususnya di hal penggunaan JPY terlihat rugi dalam perdagangan dengan Republik Korea, namun mereka memperoleh keuntungan dari kenaikan penggunaan JPY dalam ekspor Republik Korea ke RRT. Daripada menonjolkan sisi negatif bagi Jepang,

pendekatan sisi positif dari penggunaan JPY oleh Republik Korea untuk ekspor ke RRT dapat digunakan sebagai titik temu antara ketiga negara Plus-3.

Penggunaan Mata Uang Lokal ASEAN+3 oleh Indonesia pada Perdagangan Global

Untuk periode tahun 2010–2023, penggunaan USD sebagai mata uang dalam transaksi perdagangan internasional oleh Indonesia terlihat mengalami penurunan, di mana penggunaannya pada ekspor lebih tinggi daripada impor. Indonesia mendapatkan manfaat dari penggunaan USD yang lebih banyak pada ekspor daripada impor sehingga tidak mengalami kesulitan likuiditas. Penggunaan mata uang lokal ASEAN+3 yang mengalami tren menaik untuk transaksi ekspor impor Indonesia adalah CNY, yang untuk ekspor 2023 mencapai 2,1% dan impor mencapai 6,7%. Penggunaan rupiah (IDR) sendiri meningkat untuk sisi impor, dan menurun

Grafik 4. Perkembangan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Ekspor dan Impor Indonesia secara Global



Catatan: Diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia publikasi Bank Indonesia, data tahunan hingga tahun 2023

di sisi ekspor. Penggunaan JPY terlihat terjadi tren menurun pada sisi ekspor dan impor, sementara untuk mata uang lain tidak terjadi kenaikan maupun penurunan yang berarti. Dari pembahasan penggunaan mata uang lokal, Indonesia mendapatkan manfaat atas substitusi USD, namun dengan biaya yang di dalamnya terjadi penurunan penggunaan JPY dan tidak terjadi kenaikan penggunaan IDR pada sisi ekspor.

Pada sisi nilai nominal transaksi, impor Indonesia dalam mata uang kawasan lebih besar daripada ekspor, kecuali pada peso Filipina (PHP) pada tahun 2023, ditambah dengan dolar Hongkong secara umum. Posisi impor yang lebih besar daripada ekspor menunjukkan tren meningkat dengan mata uang CNY, KRW, IDR, MYR, SGD, dan THB, sementara tren

selisih yang menurun hanya dengan JPY. Dari perspektif ini, eksposur Indonesia atas mata uang lokal ASEAN+3 lebih besar daripada USD, dan Indonesia perlu menyeimbangkan posisinya dalam diskusi penggunaan USD atas mata uang lokal. Selisih positif ekspor dan impor dari transaksi yang menggunakan USD memberikan manfaat untuk menopang likuiditas neraca pembayaran, yang sebagian besar dalam USD, termasuk pada sisi investasi. Kondisi Indonesia mirip dengan Republik Korea di mana selisih transaksi dalam USD ekspor lebih besar daripada impor. Namun, Thailand, terjadi tren di mana impor dalam USD lebih besar daripada ekspornya, yang berpengaruh pada eksposur Thailand apabila terjadi kesulitan likuiditas neraca pembayaran dalam USD.

Perkembangan Diskusi Mata Uang Lokal di Jaringan Pengaman Keuangan ASEAN+3

Konferensi Tingkat Tinggi antara Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN bersama dengan RRT, Jepang, dan Republik Korea pada tahun 1999 mengamanatkan agar sektor keuangan, salah satunya, mengembangkan mekanisme *self-help* di kawasan dalam kerangka ASEAN+3. Pada tahun 2000, pada Konferensi Tingkat Menteri, di Chiang Mai, Thailand, inisiatif jaringan pengaman kawasan disepakati dinamakan Chiang Mai Initiative (CMI) yang dimultilateralisasi menjadi Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) sejak tahun 2010. Dalam perkembangannya, kawasan merasa belum perlu untuk melakukan aktivasi atas *pool* komitmen ini, tetapi berbagai penguatan terus dilakukan agar inisiatif ini siap saat diperlukan. Pada tahun 2019, fasilitas yang bernilai mencapai USD240 miliar ini disepakati, yang salah satunya, penggunaan mata uang lokal dengan prinsip sukarela dan berdasarkan permintaan. Dengan demikian, dari sebelumnya CMIM hanya menggunakan mata uang USD, apabila diperlukan, dapat diaktivasi dari 14 mata uang lokal yang ada di ASEAN+3, yaitu 13 dari negara anggota ASEAN+3 dan HKD.

Pembahasan atas apakah

Tabel 1. Besar Selisih Transaksi Ekspor dan Impor Indonesia dalam USD dan Mata Uang Lokal ASEAN+3

Mata Uang	2023	Rerata 2010—2023
USD	63.351,9	36.397,3
CNY	(8.948,8)	(1.752,0)
HKD	(21,8)	10,2
JPY	(3.129,4)	(3.759,8)
KRW	(50,4)	(26,1)
IDR	(4.775,1)	(2.885,9)
MYR	(369,1)	(321,2)
PHP	26,4	16,9
SGD	(2.593,1)	(1.544,3)
THB	(461,2)	(369,5)

Catatan. Dalam juta USD. Diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia publikasi Bank Indonesia. Data tahunan, periode 2010—2023.

mata uang lokal ini hanya dapat diberikan oleh negara penerbit atau juga oleh bank sentral negara anggota lain telah dirampungkan pedoman operasionalnya pada tahun 2023, termasuk *test run*. Untuk tahun 2024, penguatan pada penggunaan mata uang lokal akan terkait dengan struktur margin yang menyatu, selaras dengan konvensi pasar keuangan internasional. Sejak tahun 2013, tiap tahunnya CMIM dites kesiapannya melalui suatu simulasi, di mana simulasi tahun 2023 dan 2024 melibatkan penggunaan mata uang lokal. Selain inisiatif mata uang lokal pada aktivasi CMIM, sejak tahun 2023 dilakukan pembahasan terkait penggunaan *freely usable currency* berupa USD serta mata uang kawasan yang termasuk dalam basket SDRs IMF, yaitu CNY dan JPY. Ketiga mata uang tersebut dapat digunakan oleh RRT (termasuk Hongkong), Jepang, dan Republik Korea di saat ada anggota yang melakukan aktivasi fasilitas *Rapid Financing Facility* dalam kerangka CMIM.

Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam transaksi ekspor dan impor secara global, dengan contoh pada Indonesia, Republik Korea, Thailand, menunjukkan terjadinya tren penurunan penggunaan USD sebagai mata uang transaksi. Pada Republik Korea dan Indonesia, meskipun terjadi

penurunan, porsi ekspor masih lebih tinggi daripada impor sehingga apabila USD diperlukan dalam neraca pembayaran yang lebih komprehensif, likuiditas USD relatif terjaga. Namun, pada data Thailand, penggunaan USD pada sisi impor lebih tinggi daripada ekspor, yang patut diduga eksposur atas risiko likuiditas USD-nya lebih tinggi. Penggunaan USD secara global dan di kawasan masih tinggi sehingga pembahasan atas diversifikasi mata uang lokal dalam CMIM perlu dibahas secara hati-hati. Perspektif yang dilihat baru dari sisi ekspor dan impor barang, yang hanya sebagian kecil porsi neraca pembayaran, di mana investasi asing pencatatannya berdasarkan mata uang transaksi belum banyak tersedia untuk kawasan ASEAN+3.

Dalam pembahasan penggunaan mata uang lokal, dalam perspektif perdagangan internasional, perlu kehati-hatian atas eksposur atas mata uang lokal yang meningkat ke depannya. Tren tersebut terlihat pada contoh Indonesia di mana selisih negatif antara ekspor dan impor dengan beberapa mata uang non-USD menunjukkan tren meningkat, termasuk atas mata uang IDR yang merupakan kedaulatan Indonesia. Pada Republik Korea, porsi penggunaan CNY dan HKD lebih besar di sisi ekspor, namun untuk JPY dan KRW sendiri lebih besar impor daripada ekspor.

Pada Thailand, secara rata-rata transaksi ekspor menggunakan USD lebih besar daripada impor, namun sejak tahun 2013, impor dalam USD lebih besar daripada ekspornya. Selain JPY, secara rata-rata, porsi penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional Thailand lebih besar pada sisi ekspor daripada impor, termasuk untuk THB.

Pergerakan penggunaan mata uang lokal tidak ke arah konvergen, khususnya bagi penggunaan CNY dan JPY yang menunjukkan tren meningkat bagi CNY, namun tren menurun bagi JPY. Indonesia dan ASEAN+3 harus berhati-hati agar tidak terjebak ke isu politik dari persaingan antara kekuatan global dalam diskusi kerja sama sektor keuangan. Faktor politik tidak dapat dihindarkan dalam pengambilan keputusan, namun pertimbangan ekonomi idealnya menjadi rujukan utama. Selain porsi JPY yang lebih besar di sisi impor daripada ekspor pada sampel, poin lain titik temu antara divergensi CNY dan JPY adalah penggunaan JPY oleh Republik Korea untuk ekspor ke RRT yang menunjukkan tren meningkat. Perlu pendekatan yang berbeda terhadap semua anggota sesuai dengan analisis data tiap anggota, namun pendekatan ini memerlukan sumber daya waktu yang memadai, termasuk terdapat faktor ketersediaan data.



Meneropong Keketuaan Malaysia di Kerja Sama Keuangan ASEAN tahun 2025

Lilik Surya Nugrohojati¹²

Tahun 2025 akan menjadi babak penting bagi Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), yaitu memperingati 10 tahun berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Tahun 2025 juga akan menandai diluncurkannya Visi Komunitas ASEAN 2045 yang akan memetakan arah masa depan kawasan selama dua dekade mendatang.

Di saat bersamaan, dunia di tahun 2025 diperkirakan masih diliputi ketidakpastian. Ancaman proteksionisme, perang tarif, dan belum

redanya ketegangan geopolitik akan menjadi tantangan tersendiri bagi kohesi internal ASEAN. Meski demikian, kawasan Asia Tenggara memegang peran penting sebagai pasar barang dan jasa terbesar sekaligus menjadi bagian yang semakin penting dari rantai produksi barang dan jasa global (Alfaro, L and D Chor (2023) - *Global Supply Chains: The Looming 'Great Reallocation'*, IMF 2022-*Global trade and value chains during the pandemic*).

Dengan latar belakang tersebut, Malaysia akan

memimpin ASEAN pada tahun 2025 dengan sebuah harapan besar akan adanya pencapaian yang nyata. Melalui tema *Inclusivity and Sustainability*, Malaysia ingin menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan pembangunan regional yang lebih terintegrasi, inklusif dan keberlanjutan. Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, di proses kerjasama keuangan (*Finance Process*) ASEAN, telah ditetapkan 3 (tiga) prioritas utama atau *Priorities Economic Deliverables* (PED) sebagai berikut.

¹²Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Kebijakan Fiskal

Pertama, Catalysing Access to Financing for a Climate Resilient and Just Transition in ASEAN. Melalui prioritas ini, target output yang ingin dicapai diantaranya adalah publikasi dan penerapan pedoman *ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance* versi 4 dan *ASEAN Transition Finance Guidance* Versi 2. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan guna mendukung transisi yang adil dan tahan iklim di kawasan ASEAN. Selain itu, inisiatif ini memastikan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon dilakukan secara adil, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan masyarakat yang terdampak, mendukung pelatihan ulang tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja hijau. Penerapan pedoman ini sangat penting untuk mempercepat pendanaan proyek hijau di kawasan, dukungan pembiayaan untuk proyek hijau, dan dukungan transisi hijau kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

Kedua, pengembangan pasar modal ASEAN, yang bertujuan untuk memperkuat integrasi pasar modal di kawasan ASEAN, sehingga dapat meningkatkan likuiditas, efisiensi, dan akses keuangan bagi semua negara anggota. Salah satu langkah utama adalah harmonisasi regulasi pasar modal di seluruh ASEAN, peningkatan konektivitas antara bursa saham di negara ASEAN untuk meningkatkan likuiditas, dan membuka akses investor ke berbagai instrumen keuangan

di seluruh kawasan. Dengan langkah-langkah ini, Malaysia berupaya mewujudkan penguatan pasar modal ASEAN yang lebih terintegrasi, efisien, dan inklusif, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan.

Ketiga, Fostering Inclusive Instant Payment Connectivity in ASEAN, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan di seluruh kawasan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif, cepat, dan terintegrasi, yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan mengembangkan sistem pembayaran instan yang dapat diakses oleh semua orang dimanapun, ASEAN berharap dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Sistem pembayaran instan ini memungkinkan transfer dana secara *real-time*, yang tidak hanya cepat tetapi juga aman dan terjangkau semua lapisan.

Keketuaan Malaysia di ASEAN 2025 menjadi peluang penting bagi negara-negara di kawasan untuk memperkuat pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global. Sebagai negara serumpun, sekaligus sebagai salah satu diantara *founding fathers*, sudah selayaknya Indonesia memiliki peran strategis untuk mensukseskan Keketuaan Malaysia tahun 2025. Sebaliknya bagi Indonesia,

ini menjadi kesempatan untuk dapat menyelaraskan kepentingan regional dengan prioritas nasional guna mewujudkan masa depan ASEAN sebagai sebuah zona yang damai, stabil, dan makmur.

Dengan momentum kesamaan visi 2025 menuju cita-cita tahun 2045, Indonesia memiliki peluang strategis untuk memanfaatkan posisi politik, ekonomi dan keamanannya yang stabil untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan agenda regional yang lebih kuat. Terlebih, tema *Inclusivity and Sustainability* yang diusung Malaysia sangat selaras dengan tema kebijakan fiskal Indonesia tahun 2025 “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan, dan menggapai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, dengan pengalamannya dalam penerapan *green bond* dan pembiayaan transisi energi terbarukan, Indonesia dapat berpartisipasi aktif untuk mendukung inisiatif PED yang pertama. Apalagi pemerintahan baru

juga sangat fokus pada pengembangan infrastruktur hijau, seperti energi terbarukan dan transisi energi, yang sangat selaras dengan prioritas ini. Sebagai salah satu pemegang saham terbesar ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF), Indonesia memiliki posisi strategis untuk memperkuat AIF dalam rangka menutup kesenjangan infrastruktur di kawasan melalui inisiatif inovatif, seperti penerbitan obligasi hijau dan pengembangan proyek yang ramah lingkungan. Untuk itu, keterlibatan mitra pembangunan untuk meningkatkan kapasitas pendanaan AIF, dan mendorong suksesnya inisiatif ASEAN *Catalytic Green Facility* (ACGF) perlu untuk terus didorong.

Indonesia juga harus menyambut baik perluasan konektivitas pembayaran instan lintas negara dalam prioritas *Fostering Inclusive Instant Payment Connectivity in ASEAN*. Indonesia telah memiliki pengalaman signifikan dalam membangun infrastruktur pembayaran digital melalui sistem seperti BI-FAST dan QRIS. Partisipasi aktif dalam pengembangan *roadmap* pembayaran instan ASEAN tidak hanya akan memperkuat ekonomi digital kawasan tetapi juga membuka peluang lebih besar bagi UMKM Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok regional. Terlebih, Malaysia juga merencanakan untuk memperkenalkan *Greening Value Chain* ke tingkat regional

untuk mendukung mendukung UMKM dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dan bertransisi ke operasi rendah karbon. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan bisnis sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan.

Inisiatif dukungan regional kepada upaya UMKM untuk melakukan transisi hijau ini berpotensi memperkuat inisiatif dan kebijakan dukungan kepada UMKM yang telah ada seperti Kredit Usaha Rakyat untuk Pembiayaan Hijau dan Kalkulator Hijau dari Bank Indonesia. Kalkulator Hijau ditujukan untuk untuk memantau tingkat kehijauan aktivitas ekonomi dan tingkat keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau, membantu pemenuhan kebutuhan pelaporan keberlanjutan (*disclosure*) yang diprasyaratkan oleh regulator dan pasar global, dan membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau. Indonesia memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman sekaligus berpeluang untuk meningkatkan kemanfaatan Kalkulator Hijau agar dapat memperkuat kerja sama keuangan regional. Dengan sistem pembayaran regional yang lancar dan aman, akan mempermudah aktivitas pelaku usaha, memacu pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Meskipun terdapat peluang besar, implementasi agenda regional dalam prioritas

Keketuaan Malaysia di ASEAN tahun 2025 tidak akan lepas dari tantangan. Harmoni regulasi lintas negara, pemenuhan kebutuhan investasi yang besar, serta diplomasi ekonomi yang efektif menjadi elemen penting yang harus dikelola dengan baik. Dibutuhkan komitmen kuat dari negara anggota ASEAN untuk dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjawab keraguan terhadap kemampuan ASEAN untuk dapat menciptakan karya nyata. Disinilah Indonesia harus menunjukkan kepemimpinannya di ASEAN untuk bersama-sama mengatasi berbagai tantangan tersebut.



Dari Jalanan Jakarta, Menuju Jantung Keuangan Dunia

Rosyid Bagus Ginanjar¹³

Dari balik dapur sederhana sebuah warung kecil di desa perdikan Majan, bekas kejayaan Kesultanan Mataram, aroma kopi lokal menyeruak seolah mengajak pagi untuk bangkit dari selimut embunnya. Uap kopi yang mengepul melambai ramah, menyampaikan pesan hangat kepada setiap pembeli yang datang. Suara sendok yang

beradu dengan cangkir kecil berbisik mesra, menciptakan harmoni sederhana di tengah suasana selepas Subuh. Dari sinilah tersimpan kisah seorang gadis muda bernama Hafidzatul Khumaira Nisa, yang penuh kesederhanaan dan kehangatan,

Cangkir-cangkir kecil itu, berdiri tegak seperti prajurit yang setia. Mereka menunggu tangan terampil

Nisa mencampur kopi, gula, dan air panas tanpa ragu. Setiap cangkir yang disajikan mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (UIN SATU) itu adalah simbol tekad, sebuah langkah kecil menuju mimpi besar menjadi seorang pengajar.

“Masyarakat sini lebih suka kopi lokal tradisional.

¹³Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal



Aromanya harum meski cangkirnya kecil,” ujar Nisa sembari tersenyum, penuh keyakinan.

Warung kecil itu adalah panggung bagi Nisa untuk membuktikan bahwa mimpi besar bisa dirajut dari kesederhanaan. Baru-baru ini, Nisa meraih kemenangan dalam pemilihan Gus-Ning di kampusnya. Kemenangan ini bukan hanya soal mahkota dan selempang, melainkan simbol dari keberanian seorang gadis muda menghadapi tantangan hidup dengan tekad luar biasa.

Dari setiap ampas kopi yang tersisa, Nisa memetik hikmah. Ia tahu, meski pekat dan tertinggal di dasar cangkir, ampas kopi tetap memiliki nilai. Begitu pula

perjuangannya—meski tampak kecil dan sederhana, ia yakin akan menjadi pembuka jalan menuju masa depan yang cerah. Di balik setiap seruput kopi yang ia racik, terselip doa dan harapan besar untuk menjadi cahaya bagi banyak orang. Sebagaimana pagi yang terbangun oleh aroma kopi di warung Nisa.

Pendidikan dan Bisnis Keluarga

Nisa bukanlah sosok yang hanya berfokus pada studi dan kegiatan akademik semata. Di balik prestasi gemilangnya, ia juga memiliki komitmen untuk membantu keluarga. Nisa berasal dari keluarga yang sederhana. Setiap hari, ia tidak hanya menghadiri perkuliahan di UIN SATU tetapi juga

membantu ibunya berjualan kopi di warung serta ikut andil dalam usaha keluarganya menjual bensin di depan rumah.

Kehidupan sehari-hari Nisa penuh dengan rutinitas yang padat. Pada pagi hari, setelah selesai dengan tugas-tugas kampus, ia sering terlihat membantu ibunya menyiapkan kopi yang dijual di warung kecil milik keluarganya. Warung kopi ini tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga menjadi ruang interaksi bagi banyak orang yang datang untuk menikmati secangkir kopi sambil berbincang ringan tentang masalah hidup.

Tidak hanya itu, Nisa juga membantu ayahnya berjualan bensin. Di depan rumah mereka yang terletak di jalan utama, ayah Nisa membuka usaha pengecer bensin yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. Ia merasa bahwa membantu orang tuanya adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai anak dan bagian dari perannya dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

“Kadang, saya merasa capek tetapi saya tahu kalau semua yang saya lakukan untuk membantu orang tua saya. Ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai anak,” ujar Nisa dengan mata yang berbinar.

Perjuangan Meraih Mimpi

Meskipun disibukkan dengan

berbagai pekerjaan rumah dan bisnis keluarga, Nisa tidak pernah mengabaikan pendidikan. Bahkan, ia memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang mahasiswa yang punya indeks prestasi *cumlaude* di kampusnya. Untuk itu, ia menjalani setiap hari dengan penuh disiplin dan fokus. Nisa tahu bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah.

Selama kuliah di UIN SATU, Nisa selalu menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Setiap hari, ia menyempatkan diri untuk belajar di tengah kesibukan. Tak jarang, Nisa mengorbankan waktu istirahatnya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Namun, ia selalu merasa bahwa usaha kerasnya akan terbayar pada akhirnya.

Dan benar saja, perjuangannya membuahkan hasil yang manis. Perjuangan meraih predikat *cumlaude*—suatu prestasi yang luar biasa mengingat beban tanggung jawab yang ia pikul di luar dunia kampus.

“Menjadi *cumlaude* bukanlah tujuan utama saya tetapi saya percaya bahwa usaha keras akan membawa hasil yang baik. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik bagi keluarga saya dan membuat mereka bangga,” kata putri kedua dari Gus Raden Ansorudin dan Sulistiani.

Bagi Nisa, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh nilai tinggi. Ia menganggap pendidikan sebagai sarana untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam setiap materi

“Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang sangat penting untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam. Selain itu, berbahasa Arab juga membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia,”

kuliah yang dipelajari, Nisa berusaha untuk mengaitkan teori dengan praktik di dunia nyata. Ia juga aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis, untuk memperluas wawasan dan pengalaman.

Bahasa Arab Sebagai Jembatan Budaya dan Ilmu

Selain prestasinya di bidang akademik, ada satu hal yang membuat Nisa semakin menonjol, yaitu kemampuannya dalam berbahasa Arab. Nisa merupakan mahasiswa yang memiliki keahlian berbahasa Arab yang cukup mumpuni. Keahliannya ini tidak hanya diperoleh dari bangku kuliah tetapi juga dari minatnya yang besar terhadap bahasa



dan budaya Arab. Sejak kecil, Nisa sudah terbiasa mendengar dan mempelajari bahasa Arab melalui berbagai sumber, seperti buku, media, dan ceramah agama. Ia juga tercatat sebagai santri kalong di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadien, Simo.

Menurut Nisa, kemampuan berbahasa Arab sangat penting terutama bagi mahasiswa di UIN SATU yang merupakan perguruan tinggi Islam. Bahasa Arab membuka banyak pintu ilmu pengetahuan, baik itu dalam kajian agama, sastra, maupun ilmu-ilmu lainnya. Nisa sangat menyadari bahwa bahasa Arab adalah kunci untuk memahami banyak literatur dan sumber ilmu yang berasal dari dunia Islam.

“Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang sangat penting untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam. Selain itu, berbahasa Arab juga membuka kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia,” ujarnya dengan penuh semangat.

Berkat kemampuannya ini, Nisa juga aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan bahasa Arab. Salah satu pencapaian besar yang baru saja diraih Nisa adalah kemenangannya dalam pemilihan Gus-Ning di UIN SATU. Pemilihan ini bukan sekadar ajang untuk mencari siapa yang paling berbakat melainkan sebuah kontes yang menilai integritas, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan,

dan wawasan sosial.

Kemenangan Nisa sebagai Ning adalah bukti nyata bahwa ia bukan hanya seorang yang pintar tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu memimpin teman-temannya. Ketika ditanya tentang kemenangan ini, Nisa menjelaskan bahwa ia tidak mempersiapkan diri untuk menang, melainkan untuk memberikan yang terbaik.

“Saya melihat ini sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi kepada kampus dan teman-teman saya. Kemenangan ini adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada saya, dan saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab,” ujar Nisa.

Menjadi Gus-Ning memang bukan hal yang mudah. Nisa harus mengikuti serangkaian tes dan wawancara, serta menghadapi banyak tantangan dalam proses seleksi. Namun dengan kepercayaan diri dan persiapan yang matang, Nisa berhasil memenangkan hati para juri dan mahasiswa lainnya. Kemenangannya tidak hanya menunjukkan kecerdasan akademisnya tetapi juga kemampuannya dalam beradaptasi dan menghadapi tantangan dengan penuh ketenangan.

Berkah dari Ampas Kopi

Nisa adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras, tekad, dan dedikasi, kita dapat meraih apa yang kita impikan. Meskipun harus

menjalani berbagai kesibukan, baik dalam dunia akademik maupun membantu orang tua, Nisa selalu mampu menyeimbangkan semua tanggung jawabnya dengan baik. Ia mengajarkan kita bahwa sukses tidak datang dengan mudah tetapi melalui proses yang penuh perjuangan.

Dalam perjalanan hidupnya, Nisa menunjukkan bahwa kita tidak harus memilih antara mengejar impian atau membantu keluarga. Kita bisa melakukan keduanya, asalkan kita memiliki tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah.

“Saya percaya bahwa setiap orang bisa sukses jika mereka berusaha keras dan memiliki tujuan yang jelas. Semua yang saya lakukan, saya lakukan untuk keluarga saya dan orang-orang yang saya cintai. Ampas kopi membawa berkah,” ujarnya.

Nisa adalah kisah tentang perjuangan, pengorbanan, dan cinta kepada keluarga. Ia adalah sosok yang mampu menginspirasi siapa saja untuk tetap berjuang meskipun kehidupan tidak selalu mudah. Di tengah segala kesibukan dan tantangan yang ia hadapi, Nisa tetap teguh pada impian-impian besarnya. Kemenangan yang ia raih, baik dalam pemilihan Gus-Ning maupun dalam dunia akademik adalah bukti bahwa usaha keras tidak pernah sia-sia.



Jelajah Nusantara – Anggun dan Cantiknya Rinjani

Sulyvan¹⁴

Siapa tak tahu Gunung Rinjani? Salah satu gunung berapi yang terkenal dan tertinggi di Indonesia ini merupakan gunung dengan sejuta daya tarik dengan keindahan alam yang dimilikinya. Terletak di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gunung Rinjani tidak hanya menjadi tujuan pendakian bagi mereka pecinta alam, tetapi juga memiliki nilai penting tersendiri bagi kebudayaan dan kepercayaan masyarakat Lombok.

Gunung Rinjani berada di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang merupakan daerah bergunung-gunung dengan ketinggian mulai 500 – 3.726 meter di

atas permukaan laut (mdpl). Di sekitar kawasan TNGR tersebut, terdapat gunung-gunung lainnya seperti Gunung Pelawangan, Gunung Daya, Gunung Sangkareang, Gunung Buah Mangge, dan Gunung Kondo. Dengan ketinggian 3.726 mdpl menjadikan Rinjani sebagai puncak tertinggi ketiga di Indonesia setelah Puncak Cartenz yang berada di dalam kawasan pegunungan Jaya Wijaya dengan ketinggian 4.884 mdpl dan Puncak Gunung Kerinci yang memiliki ketinggian 3.805 mdpl.

Sejarah Gunung Rinjani

Gunung Rinjani tidak hanya penting karena formasi geologisnya, tetapi juga

memiliki sejarah yang mendalam bagi budaya masyarakat Lombok. Masyarakat Sasak, suku asli yang tinggal di Lombok, sejak dulu menganggap Gunung Rinjani sebagai tempat yang suci. Berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki, Rinjani merupakan tempat tinggal dewa-dewi, sehingga tidak jarang ritual dan tradisi sering dilakukan di sekitar area gunung ini. Bagi mereka, Rinjani adalah simbol penting kehidupan dan keseimbangan alam. Selain itu, terdapat Danau Segara Anak yang berada di dalam kawah Rinjani, danau ini juga dianggap sebagai tempat yang memiliki makna spiritual yang kuat. Masyarakat sekitar meyakini bahwa air dari

¹⁴Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

danau ini memiliki khasiat penyembuhan sehingga sering digunakan untuk tujuan pengobatan. Ada banyak cerita dari masyarakat sekitar yang menceritakan bagaimana danau indah ini terbentuk.

Sejarah tentang Rinjani dalam budaya lokal bisa ditemukan dalam berbagai mitos dan legenda masyarakat Sasak. Salah satu yang terkenal adalah kisah Dewi Anjani, yang dipercaya sebagai penguasa gunung dan danau. Bahkan, nama "Rinjani" kemungkinan berasal dari "Raja Anjani", sebutan untuk dewi tersebut. Masyarakat Sasak percaya bahwa Rinjani adalah tempat tinggal para dewa dan arwah leluhur, oleh karena itu mereka selalu menjaga dan menghormati gunung ini.

Pendakian Pertama: Gunung Rinjani

Gunung Rinjani sering menjadi tujuan utama bagi para pendaki gunung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Pendakian ke puncak Gunung Rinjani bukanlah hal yang mudah karena Rinjani terkenal dengan jalur pendakiannya yang menantang dan medannya yang terjal. Meskipun begitu, di sepanjang jalan kita disajikan dengan pemandangan alam yang luar biasa dan menjadikan pengalaman mendaki Rinjani sebagai kenangan manis dan sulit untuk dilupakan. Hal ini juga yang mendorong para pendaki untuk bisa mencapai Puncak Rinjani.



Terdapat beberapa jalur pendakian yang bisa dipilih, di antaranya adalah jalur Senaru, Sembalun, Torean, dan Timbanuh. Setiap jalur memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari jalur yang lebih landai hingga jalur yang lebih curam dan terjal. Rata-rata pendakian ke puncak Rinjani memakan waktu antara dua hingga empat hari, hal ini tergantung dari jalur yang diambil.

Tahun 2023 lalu merupakan pendakian saya untuk yang pertama kalinya dan tujuan saya langsung kepada Gunung Rinjani. Saya sendiri mengambil jalur Sembalun tepatnya Gerbang Kandang Sapi. Sebelum memulai pendakian, saya dibantu oleh pihak ketiga penyedia jasa pendakian untuk melakukan pendaftaran untuk memperoleh Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI), ini merupakan surat izin yang wajib dimiliki

oleh pendaki gunung terutama jika gunung tersebut berada di kawasan konservasi dan Rinjani salah satunya. Untuk mendapatkan SIMAKSI, salah satu syarat yang dibutuhkan yaitu surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit, yang menyatakan bahwa calon pendaki memiliki kondisi fisik prima untuk melakukan pendakian.

Pendakian dimulai dari Gerbang Kandang Sapi, mengapa dinamakan jalur Kandang Sapi? Karena tidak jauh dari gerbang tersebut memang banyak terdapat sapi ternak yang berkeliaran. Jalur ini juga menyuguhkan pemandangan alam yang memukau sepanjang perjalanan, dari hutan tropis yang lebat hingga savana yang luas. Jalur Kandang sapi juga menguji fisik bagi pendaki gunung, dengan medan yang bervariasi, jalur yang menanjak curam hingga jalur datar yang dirindukan, semua akan dilalui

oleh para pendaki.

Setiap pendakian gunung, akan ada pos-pos yang telah disediakan untuk para pendaki, semacam *check point* bagi pendaki dimana di tiap pos digunakan untuk beristirahat dan memulihkan tenaga yang terkuras akibat panjangnya jalur yang dilalui dan beratnya beban logistik yang dibawa selama pendakian. Dalam pendakian gunung, dibutuhkan manajemen logistik yang baik, jangan sampai logistik khususnya air mineral yang dibawa habis di tengah perjalanan sebelum berhasil sampai pada pos yang terdapat sumber mata air. Untuk di Gunung Rinjani sendiri, sumber mata air terletak pada pos 4 atau pos terakhir yaitu Pos Plawangan yang berada di ketinggian sekitar 2.639 mdpl. Pos Plawangan ini merupakan kaldera bawah di Gunung Rinjani sebelum mencapai puncak, para pendaki umumnya akan sampai pada sore hari, mendirikan tenda, mengambil persediaan air, dan melanjutkan perjalanan pada waktu dini hari untuk mencapai Atap Negeri Nusa Tenggara Barat yang membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam.

Mendaki dan Kebijakan Fiskal

Pengalaman mendaki gunung ini memberikan pelajaran berharga yang bisa diterapkan dalam pengambilan kebijakan di antaranya terkait perencanaan, menghadapi tantangan, kerja sama tim, dan

menentukan tujuan yang akan dicapai. Sebelum memulai pendakian, penting untuk pendaki untuk melakukan perencanaan yang matang, rute atau jalur mana yang akan dilewati, perlengkapan yang akan dibawa, dan manajemen waktu. Begitupun dalam merumuskan kebijakan fiskal, pemerintah harus merencanakan kebijakan yang akan diambil dengan matang, mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik agar kebijakan tersebut bisa diimplementasikan tanpa mengorbankan salah satu faktornya.

Setiap perjalanan pasti akan menghadapi tantangan, pendaki gunung akan menghadapi tantangan salah satu contohnya cuaca buruk, sedangkan pemerintah akan menghadapi tantangan juga seperti fluktuasi ekonomi global. Tantangan yang dihadapi baik pendaki dan pemerintah sama-sama sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, oleh karena itu dibutuhkan fleksibilitas untuk menghadapinya. Pendaki perlu menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah, begitu juga kebijakan fiskal yang dibuat harus bisa fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang dinamis.

Pendakian gunung tidak dapat dilakukan seorang diri, umumnya dilakukan oleh 3 orang. Hal ini untukantisipasi hal terburuk yang terjadi, jika 1 orang pendaki sakit atau mengalami kecelakaan, 1 orang lainnya menemani,

sedangkan 1 orang lainnya berusaha untuk mencari bantuan. Inilah yang disebut sebagai kerja sama tim. Hal ini juga sama ketika pemerintah mencoba untuk menyusun dan memutuskan suatu kebijakan, pasti akan melibatkan berbagai pihak antara pemerintah, swasta, akademisi, dan kelompok sasaran kebijakan. Kerja sama yang baik dalam satu tim akan berbuah manis, begitu juga dalam merumuskan kebijakan, sinergi berbagai pihak akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pendaki gunung dan pembuat kebijakan membutuhkan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas memberikan arah dan motivasi serta membantu dalam menentukan prioritas. Jika tanpa tujuan yang jelas, maka tindakan yang dilakukan menjadi tidak efektif. Bagi pendaki, tujuan yang jelas akan memotivasi mereka untuk memilih jalur yang paling efektif untuk mencapai puncak gunung. Hal tersebut juga bisa diterapkan oleh pembuat kebijakan, tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan yang dibuat akan mendorong para pembuat kebijakan untuk bisa menentukan dan melaksanakan program-program yang penting untuk dibiayai. Tujuan yang jelas akan menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan dalam pendakian gunung maupun dalam perumusan kebijakan fiskal.



Kepemimpinan dalam Era Transformasi

Indrawan Susanto¹⁵ & Chintya Pramasanti¹⁶

Kepemimpinan di era transformasi yang serba cepat adalah sebuah panggilan nurani bagi siapapun untuk lebih dari sekadar memimpin sebuah tim atau organisasi; memimpin adalah seni membimbing dengan visi, ketulusan, dan

keteguhan hati. Dunia yang kita hadapi saat ini tidaklah sama dengan dunia yang kita kenal kemarin. Teknologi terus berkembang, dinamika ekonomi berputar lebih cepat, dan ekspektasi dari tim, organisasi, hingga masyarakat semakin kompleks. Dalam

konteks inilah, seorang pemimpin tidak hanya perlu mengarahkan, tetapi juga harus menjadi inspirasi dan dukungan yang kokoh bagi setiap orang di sekitarnya.

Transformasi sejati dimulai dari dalam diri seorang pemimpin. Pemimpin harus

¹⁵Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I pada Badan Kebijakan Fiskal

¹⁶Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

memiliki kemauan untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, karena perubahan yang ingin ia ciptakan di luar harus dimulai dari dalam. Sebuah pepatah berkata, "Kepemimpinan adalah keteladanan dalam tindakan." Pemimpin yang memiliki integritas tinggi, sikap empatik, dan kemauan untuk terus belajar akan menginspirasi timnya untuk berbuat hal yang sama. Dengan sikap ini, seorang pemimpin membangun kepercayaan yang menjadi fondasi dari segala upaya transformasi.

Selain keteladanan, pemimpin di era transformasi harus mampu menciptakan visi yang jelas bagi timnya. Visi ini bukan sekadar target atau pencapaian angka, tetapi lebih merupakan gambaran masa depan yang ingin diraih bersama, yang memberi makna pada setiap usaha yang dilakukan. Visi yang kuat akan menjadi "bintang penunjuk arah" bagi seluruh tim, terutama saat mereka menghadapi tantangan atau saat perjalanan terasa berat. Sebuah visi yang bermakna adalah bahan bakar untuk terus melangkah, memberikan tim alasan yang lebih dalam untuk berjuang dan berubah.

Namun, transformasi tidak akan terjadi tanpa ruang untuk mendengarkan dan memahami. Di sini, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan

komunikasi yang baik. Mendengarkan dengan hati terbuka, menghargai ide-ide baru, dan merangkul pandangan berbeda adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan suasana kerja yang kolaboratif dan inovatif. Dengan demikian, setiap anggota tim merasa dihargai dan berkontribusi aktif dalam proses perubahan. Transformasi tidak pernah berjalan satu arah; ia tumbuh dari percakapan, diskusi, dan semangat gotong royong. Pemimpin yang efektif tidak pernah menyalahkan, tetapi justru menguatkan timnya, mendorong mereka untuk tetap kreatif, dan selalu mencari solusi yang *out-of-the-box*.

Pada akhirnya, kepemimpinan di era transformasi menuntut keseimbangan antara ambisi dan empati. Pemimpin yang baik tidak hanya berfokus pada hasil bisnis atau angka-angka, tetapi juga pada kesejahteraan timnya. Dia memahami pentingnya keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi, mendukung anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka tanpa harus mengorbankan aspek penting dalam hidup mereka.

Kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan adalah kepemimpinan yang membangun, bukan sekadar mengatur; yang memberdayakan, bukan memerintah. Inilah kepemimpinan yang dirindukan

dan disegani, karena di tangan pemimpin seperti ini, tim dan organisasi tidak hanya mampu bertransformasi, tetapi juga bertumbuh dengan semangat dan kebahagiaan. Transformasi yang sejati terjadi ketika setiap individu merasa didukung dan dipedulikan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk tujuan bersama. Kepemimpinan seperti inilah yang akan meninggalkan jejak yang tak terlupakan, membawa tim dan organisasi menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan.



Terima Kunjungan Studi dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan Kamboja, BKF *Sharing Knowledge* mengenai Pengelolaan PNBP

Jakarta, (02/07/2024) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerima kunjungan delegasi Kementerian Ekonomi dan Keuangan (Ministry of Economic and Finance – MEF) Kamboja bertempat di ruang rapat Analis lantai 1 gedung R.M. Notohamiprodjo, BKF. Dalam kunjungan ini, MEF Kamboja bermaksud mempelajari mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Indonesia. Di sisi lain, bagi Indonesia, hal ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan kepada MEF Kamboja dalam hal pengelolaan PNBP, dan secara tidak langsung mendukung prinsip solidaritas ASEAN, di mana para anggota saling mendukung pembangunan negara anggota lainnya.

Delegasi kunjungan studi yang dipimpin oleh Mr. Tum Mongheng, Director of Administrative and Finance, MEF Kamboja dan beranggotakan 13 orang pegawai MEF pada berbagai jenjang, diterima langsung oleh Kepala BKF, Kemenkeu Febrio Kacaribu. Dalam sambutannya Kepala BKF menyampaikan apresiasi dan mengharapkan agar kerja sama antara Kementerian Keuangan Indonesia dan Kementerian Ekonomi Keuangan Kamboja tetap solid. Disamping itu, Kemenkeu juga bisa belajar dan bertukar informasi mengenai mekanisme penerimaan pajak Indonesia untuk kebaikan kedua negara.

“Kami adalah *learning organization*, kami juga masih belajar mengenai bagaimana mengoptimalisasi penerimaan

negara bukan pajak, banyak pelajaran yang kami masih harus pelajari, namun kami sangat senang berbagi dengan anda, dengan tantangan yang dihadapi kami juga ingin selalu bertumbuh dan kita dapat belajar satu sama lain,” ungkap Febrio.

Kunjungan studi ini dilakukan dengan konsep *knowledge sharing* di mana para narasumber dari Kemenkeu dapat langsung berdiskusi dengan para peserta dari MEF Kamboja. Para narasumber menyampaikan materi, antara lain: (i) jenis dan klasifikasi PNBP; (ii) tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PNBP serta solusinya; (iii) implementasi kebijakan PNBP (pertimbangan makro ekonomi dalam penentuan target, pengumpulan PNBP, pencatatan, monev, dan audit; serta (iv) *legal framework*



Pemerintah Terus Giatkan Perumusan RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas

Jakarta, (04/07/2024) – Pemerintah kembali menggelar diskusi dengan organisasi penyandang disabilitas bersama sejumlah akademisi untuk terus menggiatkan perumusan RPP Konsensi dan Insentif bagi penyandang disabilitas. Bertempat di Aula Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (04/07), pertemuan ini merupakan diskusi lanjutan yang membahas terkait definisi konsesi, besaran konsesi serta kriteria dan sasaran penerima konsesi bagi penyandang disabilitas.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Wahyu Utomo sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q Badan Kebijakan Fiskal

(BKF), dalam pembukaan diskusi mengungkapkan bahwa Pemerintah ingin bersama-sama menyusun RPP ini bersama dengan penyandang disabilitas dan terus mendorong akses yang produktif.

“Pada diskusi ini kita sama-sama ingin menyusun RPP Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas. Kita ingin mendorong akses yang lebih inklusif bagi para penyandang disabilitas,” ujar Wahyu Utomo.

Kepala Pusat Kebijakan APBN menekankan bahwa beberapa koridor yang harus dijaga dalam penyusunan RPP ini yakni harus kuat secara konsep, kredibel secara substansi, dan dapat diimplementasikan dengan baik di level operasional.

“Substansi yang kredibel akan memberikan manfaat

yang nyata pada penyandang disabilitas dan dampak yang luas pada ekonomi. Tata kelola dalam RPP harus dijaga sebaik mungkin karena kebijakan publik harus tetap dipertanggungjawabkan kepada publik,” lanjut Wahyu.

Sebagai penutup, Kepala Pusat Kebijakan APBN menyampaikan perlunya komitmen bersama untuk hasil dari kesepakatan yang disusun bersama antara Pemerintah dengan organisasi penyandang disabilitas.

“Kita bangun komitmen bersama untuk mencapai hasil yang disepakati bersama. Semoga ini menjadi momentum yang baik dan semoga kita dapat menuliskan regulasi yang benar-benar implementatif dan memberi makna untuk kita semua. Kita saling asah, asih, asuh,” tutup Wahyu.



Pemerintah Sempurnakan Kebijakan Perpajakan dalam Menghadapi Dinamika Perekonomian Global lewat ITF Kedua

Bali (24/09/2024) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menyelenggarakan The 2nd International Tax Forum (ITF), sebuah forum internasional yang berlangsung di Bali pada 24-26 September 2024. ITF ke-2 ini mengusung tema *Adapting Tax Policies in a Dynamic World* dengan topik diskusi utama mencakup implementasi Pilar Dua, laporan belanja perpajakan, dan analisis *tax gap*. Didesain sebagai media diskusi kebijakan perpajakan yang melibatkan narasumber kompeten baik dari dalam maupun luar negeri, forum ini menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan perpajakan yang memenuhi *meaningful participation*.

Saat ini, sistem perpajakan internasional sedang menghadapi dua tantangan utama, yaitu digitalisasi ekonomi dan persaingan tarif pajak yang cukup agresif. Pesatnya perkembangan teknologi digital memudahkan perusahaan multinasional beroperasi secara lintas negara dan memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang signifikan tanpa harus hadir secara fisik di negara pasar. Selain digitalisasi ekonomi, tantangan perpajakan internasional juga terjadi dengan adanya kompetisi tarif pajak yang kemudian mendorong terjadinya praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara yang tergabung dalam *Inclusive Framework* (IF) on BEPS menyepakati

Solusi Pilar Dua, yang terdiri dari ketentuan Pajak Minimum Global dan *Subject to Tax Rules* (STTR).

“Penerapan Pilar Dua bukan lagi merupakan pilihan bagi Indonesia. Bila Indonesia tidak menerapkan Pilar Dua, maka potensi pajak akan diambil negara lain,” ujar Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono dalam pidato kuncinya.

ITF ke-2 ini juga menjadi forum diplomasi dan koordinasi yang penting dengan rangkaian pertemuan bilateral bersama beberapa mitra strategis Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam mendukung terciptanya kerja sama perpajakan internasional yang efektif.



Big Data Governance and Perspective in Knowledge Management

Anggi Pratiwi¹⁷

Pada era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, *big data* memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem saat ini. Dengan kemampuan *big data* dalam proses pengumpulan hingga menganalisa suatu data dalam kelompok yang sangat

besar maka menjadikan *big data* memiliki peran penting bagi individu maupun dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, *big data* memiliki peran krusial serta memiliki manfaat yang sangat besar untuk mengelola kompleksitas data yang

tersedia sehingga organisasi tersebut dapat memanfaatkan data secara efisien, akurat, hingga meminimalisasi adanya kebocoran data serta kesalahan dalam pengambilan keputusan.

¹⁶Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Dalam proses pengelolaan *big data* tentunya memerlukan peran dari Manajemen Pengetahuan untuk memastikan data yang dikelola tersebut akan diubah menjadi suatu pengetahuan yang berguna bagi organisasi. Buku *"Big Data Governance and Perspective in Knowledge Management"* ini terdiri dari 11 bab yang akan membahas bagaimana penerapan suatu metode dan aplikasi dalam *big data* hingga menyelaraskan ke dalam organisasi.

Bab pertama dalam buku ini ialah ***Making the Most of Big Data for Financial Stability Purposes*** yang membahas mengenai *big data* sebagai topik utama dalam bidang stabilitas keuangan. Kehadiran *big data* membuka peluang untuk mengekstraksi sinyal ekonomi secara lebih tepat waktu, meningkatkan akurasi perkiraan perekonomian dan penilaian stabilitas keuangan, serta menyediakan *feedback* yang cepat terhadap dampak kebijakan yang ada. Meskipun *big data* menawarkan banyak manfaat, penggunaannya masih dirasakan terbatas. Hal ini disebabkan oleh akan adanya berbagai tantangan operasional yang muncul, seperti kebutuhan akan sumber daya untuk memastikan pengelolaan informasi dilakukan secara efektif dan sesuai dengan aturan. Selain itu, penggunaan *big data* tetap memiliki risiko, seperti hasil analisis yang kurang akurat atau salah. Meskipun kompleks dan penuh tantangan, pemanfaatan *big data* juga

memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah, terutama dalam mendorong kerja sama internasional di bidang stabilitas keuangan.

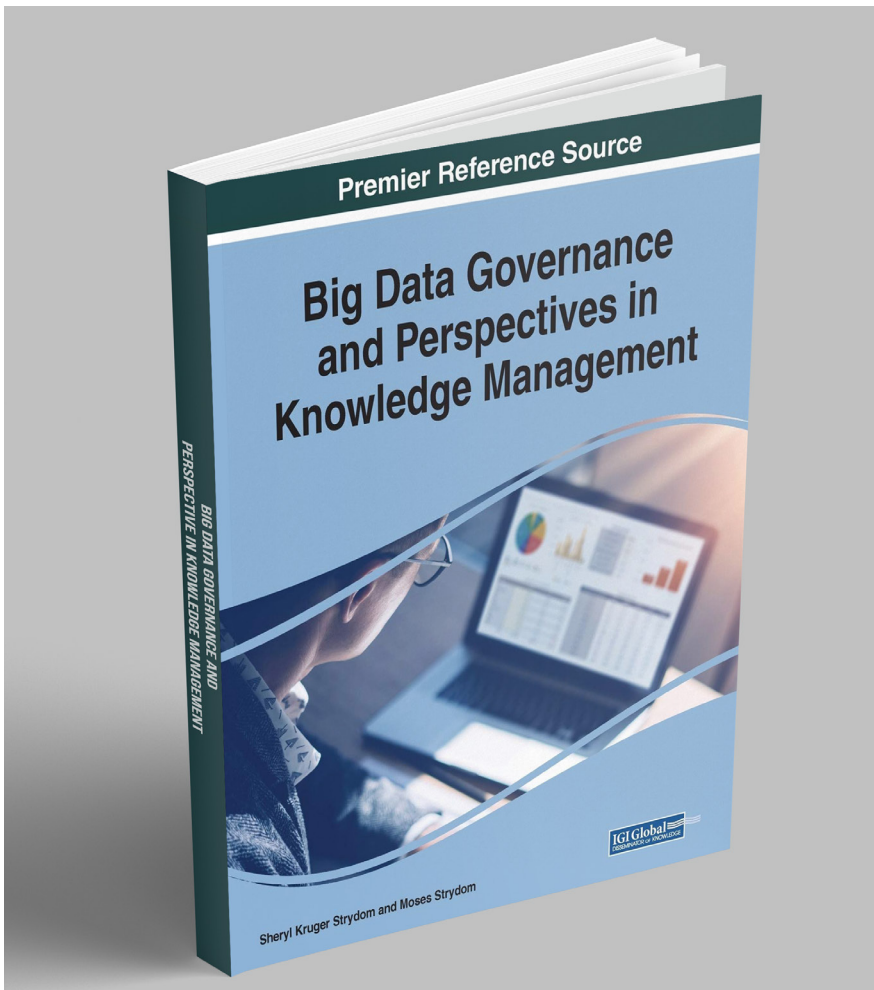
Bab kedua dalam buku ini ialah ***Big Data and Official Statistics*** yang membahas mengenai tujuan dari *official statistics* yang menyediakan informasi berkualitas tinggi, tidak memihak, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan dan penetapan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Meskipun *big data* menawarkan peluang seperti peningkatan ketepatan waktu, akurasi, hingga pemahaman terhadap isu kompleks, namun penggunaannya juga menimbulkan tantangan yang besar termasuk ancaman terhadap kualitas, ketidakberpihakan, serta polarisasi sosial di media digital. *Big data* tidak begitu saja menjadi solusi yang instan bagi kebutuhan statistik yang terus meningkat. Di tengah maraknya *big data*, National Statistical Offices (NSOs) tetap berhati-hati dalam mengelola ekspektasi, menentukan kualitas, dan memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia di era digital saat ini. NSOs tetap mengedepankan prinsipnya dalam menyajikan informasi independen serta mengevaluasi dengan cermat manfaat dan risiko dari penggunaan *big data*.

The Big Data Research Ecosystem: an analytical literature study menjadi bab ketiga dalam buku ini. Bab ini

membahas mengenai *big data* yang merupakan bidang yang terus berkembang dimana teknologi inovatif membuka cara baru untuk mengekstraksi nilai dari informasi yang melimpah. Meskipun potensinya besar, pemahaman tentang bagaimana organisasi menerjemahkan peluang ini menjadi nilai sosial dan ekonomi masih terbatas. Dalam bab ini, dilakukan tinjauan sistematis terhadap penelitian *big data*, mengidentifikasi tantangan seperti kurangnya fokus pada teknologi, dominasi pembahasan tentang algoritma, dan kebutuhan akan pendekatan berbasis siklus hidup data, yang mencakup akuisisi, analisis, kurasi, penyimpanan, hingga penggunaan data. Analisis data menjadi domain utama yang diminati, sementara aspek keamanan masih kurang mendapat perhatian. Ekosistem *big data* adalah sistem kompleks yang mencakup berbagai dimensi siklus hidup data, dengan peluang dan tantangan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Bab berikutnya ialah ***Optimization of Aerospace Big Data Including Integrated Health Monitoring With the Help of Data Analytics*** yang membahas mengenai peran dan keuntungan dari tata kelola *big data* dalam optimalisasi sistem pemantauan kesehatan terintegrasi di industri kedirgantaraan, dengan fokus pada pengumpulan, analisis, dan penggunaan data besar



yang dihasilkan oleh berbagai sensor pada pesawat modern. Dalam industri ini, pemantauan *Integrated Vehicle Health Monitoring* (IVHM) menjadi kunci, mencakup pemantauan sistem seperti mesin, struktur, avionik, hingga sistem mekanis seperti bahan bakar dan roda pendaratan. Bab ini juga menjelaskan mengenai sistem pencatatan data, simulasi, dan analisis yang mendukung pengelolaan *big data* yang memungkinkan para insinyur untuk memperoleh pengetahuan dari sistem kompleks yang sulit dianalisis secara deterministik. Dengan solusi analitik yang inovatif, bab ini juga memproyeksikan

perkembangan pesawat masa depan yang semakin bergantung pada pemanfaatan *big data* untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan di industri kedirgantaraan.

Classification Techniques and Data Mining Tools Used in Medical Bioinformatics menjadi bab kelima dalam buku ini yang membahas mengenai penggunaan teknik *data mining* (penambangan data), terutama teknik klasifikasi, untuk menganalisis *big data* dalam bidang bioinformatika dan aplikasi medis, seperti mikrobiologi dan penyakit tidak menular seperti

diabetes. Penambangan data memungkinkan pengenalan pola dan analisis *big data* melalui teknik seperti pembelajaran mesin, pengenalan pola, dan kecerdasan buatan. Alat penambangan data, seperti aplikasi WEKA yang digunakan untuk menganalisis data genomik, proteomik, dan ekspresi gen, serta untuk mengidentifikasi patogen dan menganalisis resistensi obat. Pada aplikasi WEKA dapat menunjukkan akurasi tinggi dalam analisis data medis dan penyakit tidak menular, serta telah digunakan untuk mengklasifikasikan data diagnosis kanker dan analisis data diabetes. Penambangan data membantu mengatasi tantangan volume *big data* dalam studi klinis, sementara program “Big Data to Knowledge” (BD2K) dari National Institutes of Health bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan baru dan melatih ilmuwan data biomedis untuk meningkatkan akurasi dan keandalan informasi medis.

Bab berikutnya ialah ***Big Data and People Management: the prospect of HR Managers***, yang membahas mengenai peran *big data* dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) dan bagaimana analitik *big data* dapat mempengaruhi cara SDM dikelola oleh perusahaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya persepsi manajer SDM tentang dampak *big data* dan analitik *big data*, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam

penerapannya, terutama dalam menganalisis sumber daya manusia. Fokus utama adalah pada kemampuan analitis dan orientasi proaktif yang diperlukan dalam menghadapi tantangan *big data*, yang dapat menjadi faktor kunci untuk perubahan dalam manajemen SDM.

Bab ketujuh dalam buku ini berjudul ***Big Data, Semantics, and Policy-Making: how can data dynamics lead to wiser governance?*** yang membahas mengenai pentingnya *big data* dalam pembuatan kebijakan, dengan fokus pada bagaimana *big data* dapat digunakan untuk menghasilkan bukti yang mendukung keputusan yang lebih baik. Dengan ledakan data yang sering tidak terstruktur, teknologi semantik digunakan untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang berharga. Penelitian ini memperkenalkan kerangka kerja terintegrasi untuk tata kelola *big data*, yang melibatkan tiga fase: (1) interoperabilitas data, (2) penambahan pengetahuan, dan (3) tata kelola kebijaksanaan. Teknologi utama dalam kerangka kerja ini mencakup anotasi semantik, rekayasa ontologi, penemuan pengetahuan, dan pencarian semantik untuk mendukung keputusan yang lebih bijaksana. Pada bab ini juga terdapat studi kasus yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen kebijakan dan inovasi, dengan rencana untuk memperluas penerapan kerangka kerja ini di masa depan untuk menangani masalah kompleks dan

menciptakan inovasi disruptif.

Bab kedelapan dalam buku ini ialah ***Big Data Governance in Agile and Data-Driven Software Development: a market entry case in the educational game industry***, yang membahas mengenai bagaimana membangun kerangka kerja tata kelola *big data* dalam pengembangan perangkat lunak (software) berbasis data, dengan fokus pada aspek privasi, keamanan, ketersediaan, kegunaan, dan integritas data. Dalam buku ini terdapat studi kasus mengenai pengembangan aplikasi seluler baru untuk konsumen, di mana *big data* digunakan untuk pengembangan produk, membangun model prediksi, dan personalisasi. Pada studi kasus tersebut menunjukkan bahwa kerangka kerja pada tata kelola data yang tepat begitu penting untuk membangun dan memelihara model prediksi yang dapat dipercaya dan bernilai tambah. Implementasi kerangka kerja tersebut dapat berbeda antar perusahaan, terutama perusahaan pemula di pasar negara berkembang yang memerlukan kerangka kerja yang lebih fleksibel. Studi kasus tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan perlu memotivasi pengguna untuk memberikan informasi pribadi mereka dan mengelola berbagai dimensi proses data untuk analitik perilaku pelanggan yang efektif. Dengan kerangka kerja yang memadai, perusahaan dapat mengelola data pelanggan dengan lebih baik, meningkatkan kualitas

produk berbasis *big data*, dan mempertahankan citra perusahaan yang positif.

Bab berikutnya ialah ***The Link Between Innovation and Prosperity: how to manage knowledge for the individual's and society's benefit from big data governance?*** yang membahas mengenai era digital yang berkembang pesat saat ini menghadirkan tantangan dalam mengelola pengetahuan secara tradisional, memunculkan kebutuhan untuk alat inovatif yang dapat menganalisis *big data* untuk mengekstrak nilai bisnis secara efisien. Meskipun *big data* terbukti efektif dalam memprediksi tren dan mendatangkan kemakmuran bagi berbagai sektor, namun ada kekhawatiran tentang risiko ketidaksetaraan dan ancaman terhadap demokrasi. Tata kelola data yang tepat sangat penting untuk menjaga privasi dan memaksimalkan manfaat sosial dan individu. Inovasi, yang sering kali lahir dari kesalahan dan ketidaksempurnaan, memainkan peran penting dalam kemajuan masyarakat. Meskipun data besar menawarkan banyak potensi, ada keterbatasan dalam prediksi dan informasi yang dapat diperoleh, sehingga penting untuk mempertahankan ruang bagi kreativitas manusia dan kejutan yang tak terduga, yang tidak dapat dihasilkan oleh mesin atau data semata.

Bab selanjutnya ialah ***Big Data for Prediction: patent***

analysis - patenting big data for prediction analysis yang membahas mengenai *patent analysis* (analisis paten) terkait penggunaan *big data* untuk memprediksi, dengan tujuan mengeksplorasi tren, distribusi geografis, dan konten teknis yang dilindungi. Berdasarkan analisis 296 keluarga paten yang terdaftar antara 2013 sampai dengan 2017, ditemukan bahwa ada kegiatan paten terkait *big data* untuk memprediksi perkembangan yang pesat, dengan mayoritas paten terdaftar di Cina dan Korea Selatan. Paten-paten ini sebagian besar berfokus pada instrumen komputasi, seperti pengambilan informasi dan sistem pemrosesan data. Selain itu, analisis teks mengungkapkan topik utama dalam paten, seperti *real-time*, *data mining* (penambangan data), peringatan dini, dan jaringan saraf, yang berkaitan dengan aplikasi dalam berbagai bidang,

termasuk ramalan cuaca dan analisis perilaku. Temuan ini menunjukkan pentingnya *big data* dalam mendorong inovasi prediktif dan peningkatan teknologi di berbagai sektor.

Bab terakhir dalam buku ini ialah ***The Components of Big Data and Knowledge Management Will Change Radically How People Collaborate and Develop Complex Research***, yang membahas mengenai *big data* sebagai bidang yang berkembang pesat, yang memiliki sinergi kuat dengan *Knowledge Management* (Manajemen Pengetahuan) untuk optimalisasi dalam pengambilan keputusan, mendorong inovasi, dan menciptakan ekonomi yang sukses. Dengan berkembangnya pengetahuan secara eksponensial, kolaborasi antara manajemen pengetahuan dan algoritma *big data* menjadi kunci untuk bersaing dalam lingkungan

yang semakin kompetitif. Modal intelektual, manajemen pengetahuan, dan penggunaan analitik bisnis berbasis *big data* semuanya terkait dengan aset tidak berwujud, seperti data dan pengetahuan, yang perlu dikembangkan dan dilindungi secara strategis. Pemahaman tentang pengetahuan yang relevan di berbagai industri, serta cara melindungi aset ini dari serangan kompetitif, sangat penting untuk memastikan manfaat maksimal dari *big data*.

Buku ini sangat menarik sekali untuk dibaca sebagai referensi dalam melakukan analisis, penelitian lebih lanjut mengenai keterkaitan *big data* dengan manajemen pengetahuan. Buku ini dapat membuka wawasan dan memperkaya literasi pembaca terkait *big data* yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan saat ini. Selamat membaca!



Glosarium

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) – Perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara 11 negara di Asia-Pasifik: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam, dengan untuk memfasilitasi kerja sama ekonomi antara negara-negara anggota, dengan mencakup hampir seluruh aspek ekonomi.

Kebijakan Hilirisasi – Proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi

Rules of Origin (ROO) atau ketentuan asal barang – Aturan yang digunakan untuk menentukan asal suatu produk dalam perdagangan internasional. ROO penting karena menentukan tarif

bea cukai dan memastikan kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan.

Regional Value Content (RVC) – Persentase kandungan nilai regional dari bahan baku, tenaga kerja, overhead, keuntungan, dan biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan. RVC merupakan konsep penting dalam perdagangan internasional untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi kriteria sebagai barang yang berasal dari wilayah tertentu

Skema Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) –

Terdiri dari 4 skema, yaitu (1) Penghapusan tarif preferensi, sehingga eksportir Indonesia dapat mempertahankan akses produknya ke pasar Eropa; (2) Peningkatan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa; (3) Pencantuman ketentuan investasi dalam perjanjian, sehingga aturan investasi di Indonesia menjadi lebih transparan dan dapat diprediksi; (4) Reformasi kebijakan, seperti perbaikan iklim usaha, pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, dan kebijakan ekonomi yang lebih pasti.

Hegemoni – Dominasi atau otoritas politik atau budaya yang dilakukan oleh suatu kelompok atas kelompok lain.

Friendshoring – Praktik memperoleh pasokan/suplai dari mitra yang dipercayai, tanpa memandang lokasi geografis.

Nearshoring – Kecenderungan perusahaan untuk memperoleh pasokan dari negara-negara tetangga yang memiliki pandangan serupa atau nilai-nilai yang sejalan

Trade Circumvention –

Tindakan menghindari pengenaan bea masuk anti-dumping atau bea masuk imbalan (anti-subsidi)

Kebijakan local currency

settlement – Penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara atau lebih yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara dimana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah Negara masing-masing

Rapid Financing Facility –

Fasilitas pembiayaan cepat yang dibentuk oleh Asean+3 untuk mengatasi kekurangan likuiditas

Dana pihak ketiga (DPK)

– Dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun oleh lembaga keuangan, seperti bank, untuk digunakan dalam berbagai aktivitas. Dana ini biasanya berupa tabungan, giro, dan deposito.

Makroprudensial yang

dilakukan oleh BI – Kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketidakstabilan sistem keuangan, khususnya pada kegiatan kredit.

Di Indonesia, kebijakan makroprudensial dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Kebijakan ini dapat saling melengkapi dengan kebijakan suku bunga acuan

Sunset policy – Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan diberikan pada wajib pajak tertentu yang memenuhi persyaratan

Concessional loan atau **pinjaman konsesi** – Pinjaman yang memiliki persyaratan lebih menguntungkan daripada pinjaman pasar. Pinjaman ini juga dikenal sebagai pinjaman lunak

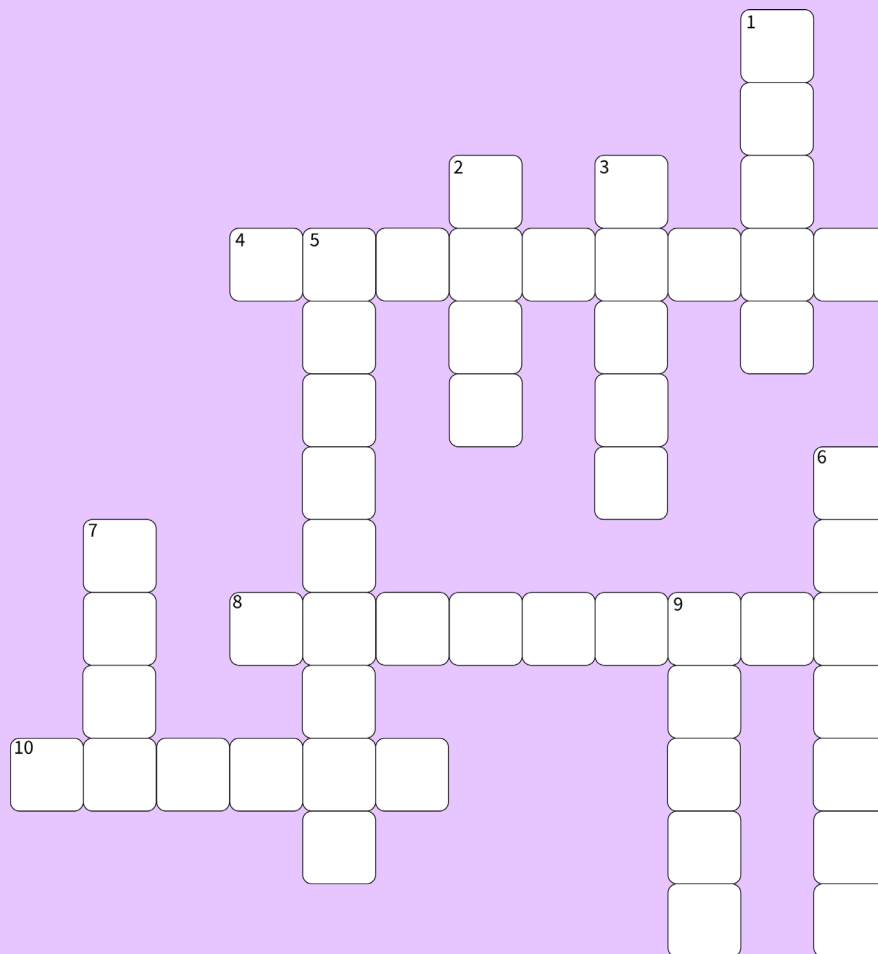
Forward linkages –

Daya pendorong yang menggambarkan tumbuhnya sektor hilir karena peningkatan input yang disediakan oleh sektor hulu.

Backward linkage –

Merangsang sektor hilir untuk berkembang karena berkembangnya sektor hulu

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 4 Kerja sama yang dilakukan 2 negara
- 8 Hal atau objek yang perlu ditanggulangi
- 10 Labil (antonim)

Menurun

- 1 Organisasi beranggotakan negara-negara Asia Tenggara
- 2 Mata uang negara Thailand
- 3 Ibu Kota Korea Selatan
- 5 Prakarsa
- 6 Gunung di Lombok
- 7 Lemah (antonim)
- 9 Makanan khas Yogyakarta

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id

Pemenang Kuis Edisi II/2024:

- 1. Sriyanto
- 2. Denny Satriawan
- 3. Apri Prayoga Arrfah



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id